



# LAPORAN TAHUNAN



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

# **KATA PENGANTAR**

---

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karuniaNya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Tahunan 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berisi kegiatan-kegiatan sesuai dengan mandat yang telah diberikan serta realisasi anggaran selama tahun 2023.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Jakarta,        Februari 2024  
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Tin Latifah, SP, M.Si, CGCAE

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 memaparkan pelaksanaan hasil kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal selama tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan dengan baik selama tahun 2023 antara lain tercermin pada capaian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp127.765.411.183,00 atau 97,51% dari pagu sebesar Rp131.030.528.000,00. Realisasi fisik/*output* sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 654 laporan atau 106% dari target fisik/*output* sebanyak 617 laporan.

Laporan tahunan ini juga menggambarkan kegiatan utama pengawasan yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) kegiatan, meliputi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal, dan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan utama, seperti Pembinaan/Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM), dan Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan upaya kerja keras untuk mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
BAB II PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL .....	3
A. Organisasi .....	3
B. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal.....	8
C. Peran Inspektorat Jenderal.....	11
BAB III PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Visium.....	12
B. Arah Pengawasan .....	14
C. Tujuan Pengawasan.....	16
D. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	17
E. Program Kegiatan Pengawasan .....	18
F. Anggaran Inspektorat Jenderal.....	19
A. Capaian Anggaran Inspektorat Jenderal .....	23
B. Capaian Anggaran dan <i>Output</i> lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi .....	26
1. Inspektorat I .....	27
2. Inspektorat II .....	30
3. Inspektorat III .....	34
4. Inspektorat IV .....	38
5. Inspektorat Investigasi.....	43
C. Capaian Anggaran dan <i>Output</i> lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal ...	46

1. Kelompok Perencanaan .....	47
2. Kelompok Keuangan dan BMN .....	50
3. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum .....	54
4. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.....	62
5. Bagian Umum .....	71
D. Capaian Kinerja Organisasi .....	77
BAB VI PENUTUP.....	80
Lampiran .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal.....	13
Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	18
Tabel 3.3 Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	20
Tabel 3.4 Pagu Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.5 Pagu Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023.....	21
Tabel 4.1 Capaian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	24
Tabel 4. 2 Capaian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023 .....	24
Tabel 4.3 Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat I.....	27
Tabel 4. 4 Rincian Kegiatan Inspektorat I Tahun 2023.....	27
Tabel 4.5 Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat II.....	30
Tabel 4.6. Rincian Kegiatan Inspektorat II Tahun 2023.....	31
Tabel 4.7 Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat III.....	34
Tabel 4.8 Rincian Kegiatan Inspektorat III Tahun 2023.....	34
Tabel 4.9 Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat IV .....	38
Tabel 4.10 Rincian Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023 .....	38
Tabel 4.11 Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat Investigasi.....	43
Tabel 4.12 Rincian Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2023.....	43
Tabel 4.13 Capaian Anggaran dan <i>Output</i> Kelompok Perencanaan.....	47
Tabel 4.14 Capaian Anggaran dan <i>Output</i> Kelompok Keuangan dan BMN.....	50
Tabel 4.15 Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) .....	52
Tabel 4.16 Capaian Anggaran dan <i>Output</i> Kelompok Humas dan Hukum .....	54
Tabel 4.17 Jumlah Artikel Media Auditor Tahun 2023.....	58
Tabel 4.18 Capaian Anggaran dan <i>Output</i> Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan .....	63
Tabel 4.19 Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjentan.....	64
Tabel 4.20 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPKP.....	64
Tabel 4.21 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK .....	65
Tabel 4.22 Hasil evaluasi atas PM Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	68

Tabel 4.23 Penerbitan Laporan Tahun 2023 .....	71
Tabel 4.24 Capaian Anggaran dan <i>Output</i> Bagian Umum .....	72
Tabel 4.25 Pengembangan Kompetensi Klasikal .....	73
Tabel 4.26 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal .....	76
Tabel 4.27 Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	4
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Itjen .....	4
Gambar 2.3 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Jenis Kelamin .....	8
Gambar 2.4 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Gambar 2.5 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Golongan .....	10
Gambar 2.6 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	10
Gambar 4.1 Tampilan Website Itjen Kementan .....	54
Gambar 4.2 Konten yang Diunggah di Media Sosial FB, IG, Twitter dan Youtube ..	56
Gambar 4.3 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang melakukan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2023 difokuskan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam mencapai target RPJMN 2020 – 2024 meliputi: (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berkualitas; (2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; (4) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Dukungan yang diberikan antara lain mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian dengan menetapkan kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 yaitu: (1) Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; (2) Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan; (3) Mewujudkan

pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;  
(4) Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat;  
(5) Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* bidang pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dan kekurangan, sehingga diperlukan laporan tahunan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan di masa mendatang.

## **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Laporan Tahun 2023 ini adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Memberikan masukan kepada penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan kinerja tahun berikutnya.
3. Untuk mengetahui berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Tahunan ini meliputi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023.

## BAB II

### PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL

---

#### A. Organisasi

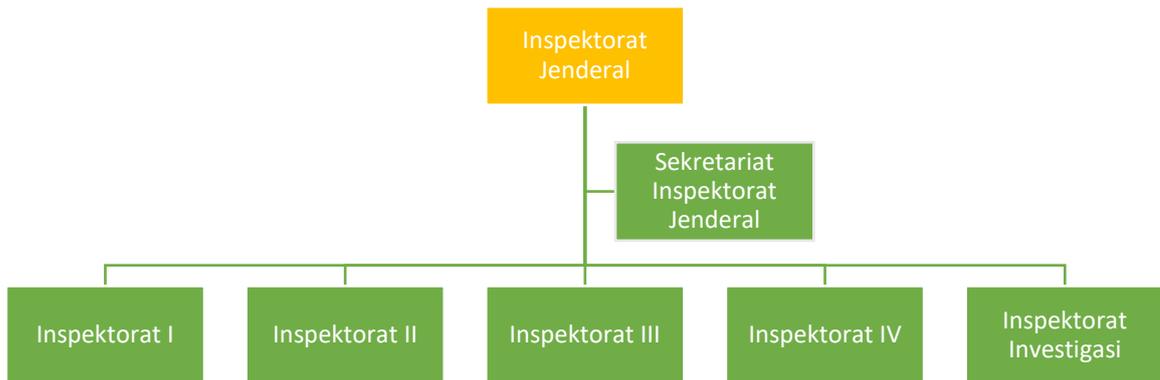
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 terdiri dari :

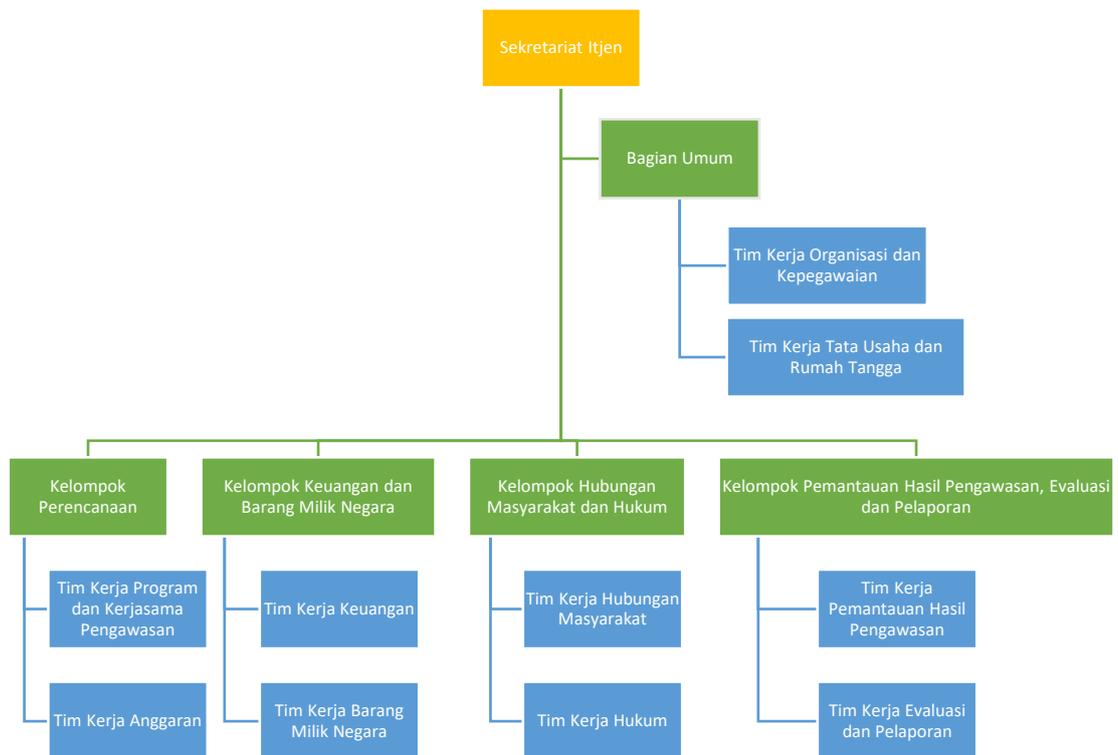
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.19 Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Itjen

## **1. Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama pengawasan;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat Jenderal;
- d) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan data dan pemantauan hasil pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

### **1) Kelompok Perencanaan**

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengawasan; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran pengawasan; dan 3) penyusunan kerja sama pengawasan. Kelompok Perencanaan terdiri dari tim kerja program dan kerja sama pengawasan dan tim kerja anggaran.

### **2) Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara**

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari tim kerja keuangan dan tim kerja barang milik negara.

3) Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan 3) pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri dari tim kerja hubungan masyarakat dan tim kerja hukum

4) Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi; 2) penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan 3) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern lingkup Inspektorat Jenderal. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari tim kerja pemantauan hasil pengawasan dan tim kerja evaluasi dan pelaporan.

5) Bagian Umum

Bagian umum terdiri dari tim kerja organisasi dan kepegawaian dan tim kerja tata usaha dan rumah tangga. Tim kerja organisasi dan kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal. Tim kerja tata usaha dan rumah tangga bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

## **2. Inspektorat I, II, III, IV**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat I, II, III, IV mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya;
- e) pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat I melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Inspektorat II melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Inspektorat III melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal; dan Inspektorat IV melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

### **3. Inspektorat Investigasi**

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Investigasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi;
- c) Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya;
- d) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- e) Pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;

- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Untuk mendukung tata laksana organisasi lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja didukung oleh:

#### 1. Subbagian Tata Usaha

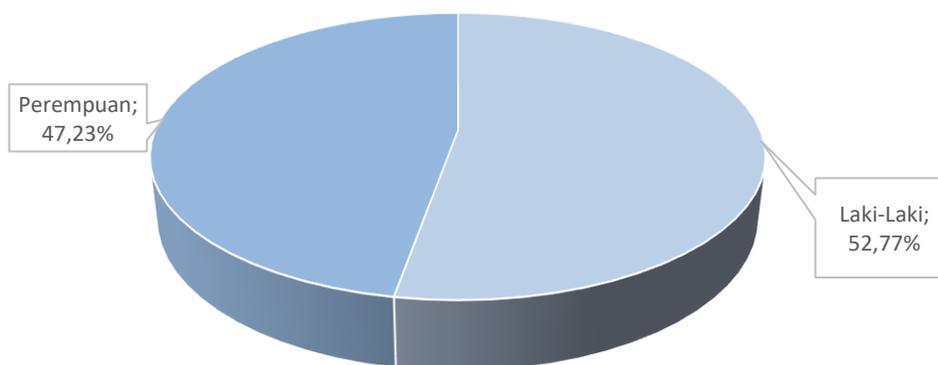
Subbagian Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan.

#### 2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi.

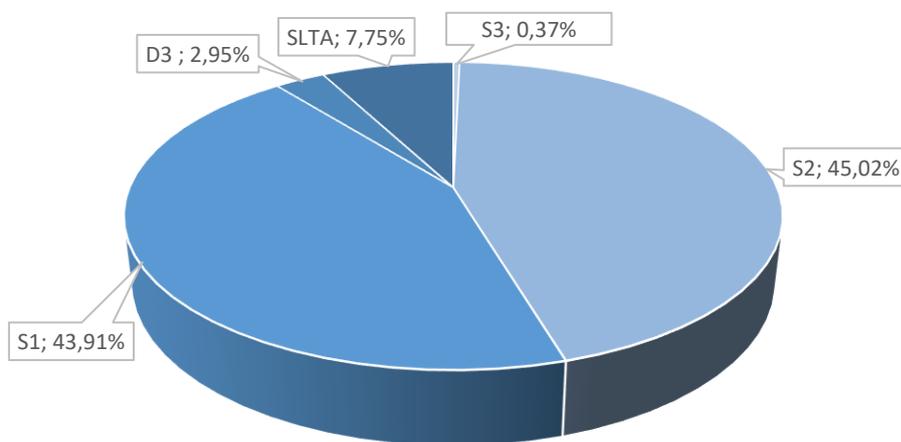
## B. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 271 orang yang terdiri dari 143 orang pegawai laki-laki (52,77%) dan 128 orang pegawai perempuan (47,23%).



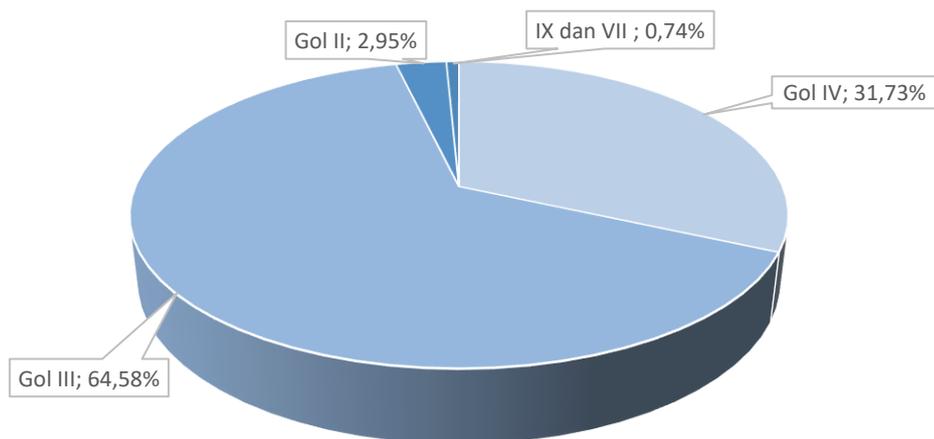
Gambar 2.3 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Jenis Kelamin

Inspektorat Jenderal sebagai instansi pengawasan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sebagian besar berlatar belakang pendidikan tinggi yaitu S3, S2 dan S1 sebesar 89,3%. Selebihnya berlatar belakang pendidikan D3 dan SLTA yang ditempatkan sebagai pendukung dalam kegiatan pengawasan. Rincian jumlah pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan pendidikan terdiri dari: S3 yaitu 1 orang (0,37%), S2 yaitu 122 orang (45,02%), S1 yaitu 119 orang (43,91%), D3 yaitu 8 orang (5,40%), SLTA yaitu 21 orang (7,75%). Persentase pegawai Inspektorat Jenderal menurut pendidikan tahun 2023 pada gambar berikut.



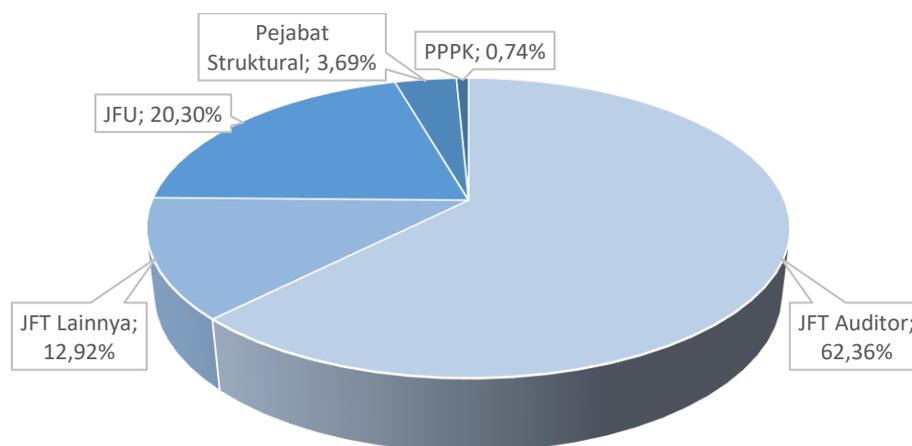
Gambar 2.4 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan golongan terdiri: golongan II yaitu 8 orang (2,95%); golongan III yaitu 175 orang (64,58%), golongan IV yaitu 86 orang (31,73%), atau sebesar 99,26% berstatus PNS dan golongan IX dan VII yaitu 2 orang (0,74%) berstatus PPPK. Mayoritas golongan pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III yaitu 64.58%. Persentase pegawai Inspektorat Jenderal menurut golongan tahun 2023 pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Golongan

Sebaran pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri : pejabat struktural yaitu 10 orang (3,69%), Fungsional Auditor yaitu 169 orang (62,36%), Fungsional tertentu yaitu 35 orang (12,92%), fungsional umum yaitu 55 orang (20,30%), dan PPPK yaitu 2 orang (0,74%). Persentase pegawai Inspektorat Jenderal menurut jabatan tahun 2023 pada gambar berikut.



Gambar 2.6 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi terbesar pegawai Inspektorat Jenderal adalah SDM Pengawasan (Fungsional Auditor) yaitu 169 orang (62,36%), dengan rincian Auditor Ahli Utama 10 orang, Auditor Ahli Madya 56 orang, Auditor Ahli Muda 41 orang, dan Auditor Ahli Pertama 62 orang.

### C. Peran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Inspektorat Jenderal berperan sebagai “*consulting partner*” yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, serta sebagai *catalysator* yaitu mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good goverment*) di seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, peran aktif Inspektorat Jenderal sebagai “*quality assurance*” dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.

## BAB III

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023. Seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian per tanggal 05 Mei 2021, dan Eselon I Badan Ketahanan Pangan per tanggal 29 Juli 2021 sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, Perencanaan Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, termasuk Renstra Inspektorat Jenderal perlu dilakukan revisi/*updated*. Dengan *terupdated*-nya Renstra Inspektorat Jenderal Revisi III Periode Tahun 2020-2024, mendorong tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun berjalan, yang memuat target Tahun 2023 yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja program yang telah ditetapkan.

#### A. Visium

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk  
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri  
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern dan terkini berbasis kawasan pertanian.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian serta arahan Menteri Pertanian tersebut, maka Visium yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

**“Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”**

Tabel 3.1 Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance dan Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas;
Pengelola Program Pembangunan Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat

Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir
--------	---

## B. Arah Pengawasan

Visium Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diatas diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian;
2. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu sinergi dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sinergi Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPKP, BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) Melalui Jaga Pangan Jaga Masa Depan yang merupakan sebuah inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*.

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam *tagline* “Jaga Pangan Jaga Masa Depan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan refocusing kebijakan pengawasan yang disebut dengan Program Jaga Pangan Jaga Masa Depan.

Refocusing kebijakan pengawasan tersebut merubah pola pengawasan Inspektorat Jenderal secara *on the spot* dengan fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Dalam rangka penyusunan rencana dan program pengawasan, diperlukan Kebijakan Pengawasan lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengawal tercapainya visi dan misi Kementerian Pertanian secara optimal. Strategi yang diusung dalam menyusun arah kebijakan tersebut konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan *public trust* kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran utama kegiatan pengawasan yaitu:

- a. Berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas;
- b. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- c. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- d. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat;
- e. Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Untuk mendukung Jaga Pangan Jaga Masa Depan, seluruh pimpinan dan jajaran Itjen Kementan paham terhadap program Kementerian Pertanian dan

merubah cara berpikir, serta cara bertindak/bekerja. Selain melakukan perubahan fundamental pola berpikir dan cara bertindak, Itjentan memandang perlu membangun sinergi dengan APH untuk mewujudkan ketahanan. Sinergitas tersebut dimaksudkan untuk mengawal tercapainya program Kementerian Pertanian secara bersama-sama, sehingga dapat membantu keberhasilan provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat yang juga menjadi keberhasilan program pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN. Akhirnya, program ketahanan pangan tercapai sebagai modalitas dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Pada tahun 2023, penguatan kebijakan Jaga Pangan telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan rakorwas bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi D.I. Yogyakarta, Sulawesi, Sumatera Selatan, Bogor, Gorontalo, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Cimahi Jawa Barat. Penguatan kebijakan Jaga Pangan juga dilakukan dengan Dialog Jaga Pangan yang dilakukan di Kab. Wonosobo, Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara, Kab. Banyuasin, Kab. Blitar, Kab. Karo Sumatera Utara, Batam, Gorontalo, Kota Tomohon dan Kota Manado Sulawesi Utara, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Mojokerto, dan Jakarta.

### **C. Tujuan Pengawasan**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian;

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi:

1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan;
2. Pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi audit investigasi dan audit tujuan tertentu;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, reviu atas laporan kinerja Kementerian Pertanian, reviu RKA-K/L, Reviu PAPBJ, Reviu HPS, dan Reviu RK-BMN, dan lain-lain;
4. Pengawasan dalam rangka pembinaan implementasi SPIP pada Instansi Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi atas penggunaan Dana Kantor Pusat/Kantor Daerah/Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
6. Pemantauan aktivitas rutin yang digunakan untuk mengelola kegiatan Pengawasan Intern serta Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menggunakan proses, alat, dan informasi yang dianggap perlu dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar.

#### **D. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal**

Komitmen pencapaian target kinerja tahun 2023 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja

sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 (revisi) tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis		Perjanjian Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33,91
		1.2	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3,00
		1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Level	3,00
		1.4	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	85,00
		1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementan	%	90,00
		1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementan	%	85,00
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal	Nilai	90,00

## E. Program Kegiatan Pengawasan

Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020–2024 difokuskan pada Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dikemukakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, meliputi:
  - a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal;
  - b. Level *Internal Audit Capability Model (IACM)* Inspektorat Jenderal;
  - c. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian;
  - d. Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
  - e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementan;
  - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementan.
2. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, yaitu: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal.

## **F. Anggaran Inspektorat Jenderal**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp154.221.814.000,00 yang disahkan oleh Menteri Keuangan di Jakarta pada tanggal 30 November 2022 dengan nomor: SP DIPA-018.02.1.238247/2023 melalui Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran tersebut beberapa kali mengalami pergeseran karena adanya Blokir *Automatic Adjustment* dan Refocusing Anggaran Kementerian Pertanian, sehingga anggaran Inspektorat Jenderal TA 2023 menjadi Rp131.030.528.000,00. Seiring berkurangnya alokasi anggaran tersebut, secara otomatis terjadi beberapa revisi Ditjen Anggaran pada DIPA TA. 2023 sebanyak 9 kali dan revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 10 kali.

Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) kegiatan, meliputi:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal,
2. Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi melalui anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023, sebagaimana tabel 3.3 dan tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3 Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
51	Belanja Pegawai	20.922.074.000
52	Belanja Barang	106.528.249.000
53	Belanja Modal	3.580.205.000
<b>Total</b>		<b>131.030.528.000</b>

Tabel 3.4 Pagu Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<b>Inspektorat I</b>	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Ditjen Hortikultura, Dan Ditjen PSP	16.542.386.000
<b>Inspektorat II</b>	Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Dan BPPSDMP	16.800.000.000
<b>Inspektorat III</b>	Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Karantina Pertanian Dan Itjen	17.061.874.000
<b>Inspektorat IV</b>	Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal. Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Setjen	16.654.742.000
<b>Inspektorat Investigasi</b>	Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	14.058.601.000
<b>Sekretariat</b>	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Inspektorat Jenderal	49.912.925.000
<b>Total</b>		<b>131.030.528.000</b>

Tabel 3.5 Pagu Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
<b>018.02.WA.Program Dukungan Manajemen</b>		<b>131.030.528.000</b>	<b>617</b>	
1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjentan		<b>49.912.925.000</b>	<b>110</b>	
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	4.101.854.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	6.592.526.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	2.553.166.000	12	Layanan
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	26.242.463.000	24	Layanan
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	3.580.205.000	2	Unit
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	5.639.251.000	12	Dokumen
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1.203.460.000	12	Dokumen
<b>4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan</b>		<b>81.117.603.000</b>	<b>507</b>	
<b>INSPEKTORAT I</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.542.386.000</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.792.084.000	51	Laporan
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.813.320.000	24	Laporan
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	162.576.000	4	Laporan
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000	27	Laporan
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	9.835.523.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT II</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.800.000.000</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.860.580.000	50	Laporan
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.100.322.000	18	Laporan
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000	2	Laporan
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000	16	Laporan
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	11.311.110.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>17.061.874.000</b>	<b>105</b>	
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.598.896.000	51	Laporan
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.455.096.000	24	Laporan
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000	2	Laporan
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000,00	24	Laporan
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	11.079.880.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>16.654.742.000</b>	<b>114</b>	
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan	Laporan	3.581.196.000	51	Laporan

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
Barantan				
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000	24	Laporan
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000	3	Laporan
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000	24	Laporan
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	11.106.566.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	<b>Laporan</b>	<b>14.058.601.000</b>	<b>72</b>	<b>Laporan</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4.427.700.000	60	Laporan
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	9.630.901.000	12	Laporan

## BAB IV

### AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN DAN KEGIATAN

Sesuai DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2023 Nomor SP DIPA-018.02.1.238247/2023 tanggal 30 November 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mendukung Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian melalui Audit, Pengawasan SPIP, Evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL, Audit Tujuan Tertentu, dan layanan audit internal lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi serta kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal melalui layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan perkantoran, layanan sarana internal, layanan perencanaan dan penganggaran, serta layanan pemantauan dan evaluasi. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan tersebut diukur berdasarkan capaian realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan.

#### A. Capaian Anggaran Inspektorat Jenderal

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp127.765.411.183,00 atau 97,51% dari pagu sebesar Rp131.030.528.000,00. Realisasi fisik/*output* sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 654 laporan atau 106% dari target fisik/*output* sebanyak 617 laporan.

Rincian realisasi anggaran per jenis belanja, dan kegiatan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Capaian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	20.922.074.000,00	20.083.061.711,00	95,99
52	Belanja Barang	106.528.249.000,00	104.178.265.076,00	97,79
53	Belanja Modal	3.580.205.000,00	3.504.084.396,00	97,87
	<b>Total</b>	<b>131.030.528.000,00</b>	<b>127.765.411.183,00</b>	<b>97,51</b>

Tabel 4. 2 Capaian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
<b>018.02.WA.Program Dukungan Manajemen</b>		<b>131.030.528.000</b>	<b>127.765.411.183</b>	<b>97,51</b>	<b>617</b>	<b>654</b>	<b>106,00</b>
<b>1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjentan</b>		<b>49.912.925.000</b>	<b>48.075.437.351</b>	<b>96,32</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100,00</b>
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	4.101.854.000	4.045.945.283	98,64	24	24	100,00
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	6.592.526.000	6.450.710.604	97,85	24	24	100,00
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	2.553.166.000	2.476.294.056	96,99	12	12	100,00
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	26.242.463.000	25.322.396.813	96,49	24	24	100,00
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	3.580.205.000	3.504.084.396	97,87	2	2	100,00
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	5.639.251.000	5.212.091.436	92,43	12	12	100,00
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1.203.460.000	1.063.914.763	88,40	12	12	100,00
<b>4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan</b>		<b>81.117.603.000</b>	<b>79.689.973.832</b>	<b>98,24</b>	<b>507</b>	<b>544</b>	<b>107,30</b>
<b>INSPEKTORAT I</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.542.386.000</b>	<b>16.407.416.867</b>	<b>99,18</b>	<b>118</b>	<b>127</b>	<b>107,63</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.792.084.000	3.778.304.698	99,64	51	51	100,00
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.813.320.000	1.806.365.253	99,62	24	28	116,67
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I	Laporan	162.576.000	148.109.700	91,10	4	4	100,00

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP							
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000	913.999.592	97,35	27	32	118,52
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	9.835.523.000	9.760.637.624	99,24	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT II</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.800.000.000</b>	<b>16.635.447.607</b>	<b>99,02</b>	<b>98</b>	<b>107</b>	<b>109,18</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.860.580.000	3.754.923.398	97,26	50	55	110,00
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.100.322.000	1.099.902.211	99,96	18	19	105,56
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000	78.046.000	99,58	2	2	100,00
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000	448.724.912	99,80	16	19	118,75
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	11.311.110.000	11.253.851.086	99,49	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>17.061.874.000</b>	<b>16.875.589.507</b>	<b>98,91</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>103,81</b>
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.598.896.000	3.568.356.150	99,15	51	51	100,00
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.455.096.000	1.429.003.289	98,21	24	24	100,00
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000	100.891.800	93,45	2	3	150,00
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000,00	807.583.323,00	98,48	16	19	118,75
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	11.079.880.000	11.000.835.572	99,29	12	12	100,00

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>16.654.742.000</b>	<b>16.521.368.224</b>	<b>99,20</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>104,39</b>
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.581.196.000	3.564.726.828	99,54	51	51	100,00
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000	1.425.301.319	98,97	24	25	104,17
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000	88.630.100	99,85	3	3	100,00
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000	437.122.749	99,77	24	28	116,67
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	11.106.566.000	11.005.587.228	99,09	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	<b>Laporan</b>	<b>14.058.601.000</b>	<b>13.250.151.627</b>	<b>94,25</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>113,89</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4.427.700.000	4.385.984.000	99,06	60	70	116,67
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	9.630.901.000	8.864.167.627	92,04	12	12	100,00

## B. Capaian Anggaran dan *Output* lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi

Pelaksanaan Pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp81.117.603.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.689.973.832,00 atau sebesar 98,24%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, meliputi:

## 1. Inspektorat I

Pada awal tahun 2023, Inspektorat I memperoleh anggaran sebesar Rp20.549.386.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp16.542.386.000,00

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.407.416.867,00 atau 99,18% dari pagu anggaran Rp16.542.386.000,00. Target *output* 118 laporan dan realisasi *output* 127 laporan atau 107,63%, dengan rincian seperti tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat I

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output	Output	%
1	Audit	3.792.084.000	3.778.304.698	99,64	51	Laporan	51	Laporan	100,00
2	Pengawasan SPIP	1.813.320.000	1.806.365.253	99,62	24	Laporan	28	Laporan	116,67
3	Evaluasi SAKIP Es I	162.576.000	148.109.700	91,10	4	Laporan	4	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	938.883.000	913.999.592	97,35	27	Laporan	32	Laporan	118,52
5	Layanan Audit Internal Inspektorat I	9.835.523.000	9.760.637.624	99,24	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.542.386.000</b>	<b>16.407.416.867</b>	<b>99,18</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>	<b>127</b>	<b>Laporan</b>	<b>107,63</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat I yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Rincian Kegiatan Inspektorat I Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit	<p>Kegiatan Audit lingkup Inspektorat I terdiri atas:</p> <p>Kegiatan audit lingkup Ditjen Hortikultura yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja</p> <p>(1) Dinas Perkebunan Dan Hortikultura (04) Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>(2) Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>(3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>(4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provtnsi Sumatera Selatan;</p> <p>(5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>(6) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (04-DK) Provinsi Jambi;</p> <p>(8) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (04);</p> <p>(9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>(10) Dinas Pangan, TPH (DK) Prov. Riau;</p> <p>(11) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;</p> <p>(12) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang (TP-04) Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Audit BMN, pada satker</p> <p>(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DI. Yogyakarta;</p> <p>(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.</p> <p>Kegiatan audit lingkup Ditjen PSP yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja, pada</p> <p>(1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (08) Dana Tugas Pembantuan;</p> <p>(2) Dinas Pertanian Provinsi Banten (TP-08) Dana Tugas Pembantuan;</p> <p>(3) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>(4) Dinas TPH dan Peternakan (08) TP Provinsi Jambi;</p> <p>(5) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah DK-08</p> <p>c. Audit BMN, pada satker</p> <p>(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DI Yogyakarta (08);</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.</p>
	Pengawasan	<p>Kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat I terdiri atas:</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Ditjen Hortikultura sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan SPI pada Kegiatan Perbenihan pada:</p> <p>(1) Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>(2) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(3) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(4) Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang Merah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;</p> <p>(5) Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang Merah pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;</p> <p>(6) Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang Merah pada satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>
		<p>Kegiatan pengawalan lingkup Ditjen PSP sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawalan SPI pada</p> <p>(1) Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP;</p> <p>(2) Kegiatan Embung Pertanian pada Direktorat Irigasi Pertanian Ditjen PSP;</p> <p>(3) Kegiatan OPLAH pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;</p> <p>(4) Dirjen PSP.</p> <p>b. Pemantauan Cetak Sawah di provinsi:</p> <p>(1) Sumatera Selatan;</p> <p>(2) Jawa Tengah;</p> <p>(3) Gorontalo;</p> <p>(4) DIY Yogyakarta;</p> <p>(5) NTB;</p> <p>(6) Kalimantan Tengah</p>
3	Evaluasi SAKIP	Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP
4	Reviu LK	<p>Inspektorat I melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan UAPPA/B, UAKPA/B Semester II Tahun Anggaran 2022 Ditjen Hortikultura.</p> <p>Reviu LK Eselon I Semester I TA 2023 lingkup UAKPA/B, Reviu LK Eselon I Triwulan III TA 2023 lingkup UAKPA/B, Reviu LK UAKPA/B per 30 September 2023 lingkup Ditjen PSP.</p>

No	Kegiatan	Uraian
5	Reviu RKAKL	Inspektorat I melakukan reviu terhadap RKAKL pada Ditjen Hortikultura yaitu Reviu Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2023, revisi realokasi anggaran direktorat jenderal Hortikultura TA 2023, Reviu Atas Pagu Indikatif TA 2024. Reviu Revisi Anggaran TA 2023, Reviu Usulan Revisi DIPA/RKA-K/L V TA 2023, rencana usulan penambahan anggaran subsidi pupuk TA 2023, usulan anggaran untuk piloting bantuan langsung pupuk ke petani (blp) kepada Kementerian Keuangan TA 2023, RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran lingkup Ditjen PSP
6	Pengawasan lainnya	Kegiatan pengawasan lainnya yang mendukung pengawasan internal lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP

## 2. Inspektorat II

Pada awal tahun 2023, Inspektorat II memperoleh anggaran sebesar Rp20.350.000.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp16.800.000.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.635.447.607,00 atau 99,02% dari pagu anggaran Rp16.800.000.000,00, sedangkan target *output* 98 laporan dan realisasi *output* 107 laporan atau 107,30%, dengan rincian pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat II

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu Rp	Realisasi		Target		Realisasi		
			Rp	%	Output	Output	Output	%	
1	Audit	3.860.580.000	3.754.923.398	97,26	50	Laporan	55	Laporan	103,92
2	Pengawasan SPIP	1.100.322.000	1.099.902.211	99,96	18	Laporan	19	Laporan	116,67
3	Evaluasi SAKIP Es I	78.376.000	78.046.000	99,58	2	Laporan	2	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	449.612.000	448.724.912	99,80	16	Laporan	19	Laporan	111,11
5	Layanan Audit Internal Inspektorat II	11.311.110.000	11.253.851.086	99,49	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.800.000.000</b>	<b>16.635.447.607</b>	<b>99,02</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>	<b>107</b>	<b>Laporan</b>	<b>107,30</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat II yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6. Rincian Kegiatan Inspektorat II Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit	<p>Kegiatan Audit lingkup Inspektorat II terdiri atas:</p> <p>Kegiatan audit lingkup Ditjen Tanaman Pangan yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dinas TPH Provinsi Kalimantan Selatan;</li> <li>(2) Dinas TP dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>(3) Dinas TP dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;</li> <li>(4) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat (03);</li> <li>(5) Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara;</li> <li>(6) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>(7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (04-DK) Provinsi Jambi;</li> <li>(8) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (04);</li> <li>(9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;</li> <li>(10) Dinas Pangan, TPH (DK) Prov. Riau;</li> <li>(11) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;</li> <li>(12) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang (TP-04) Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul> <p>b. Audit BMN Light Trap Lingkup Ditjen TP TA 2012 pada satker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY;</li> <li>(2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar (03);</li> <li>(3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah.</li> <li>(4) Audit BMN pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian Dana TP dan Dana DK</li> </ul> <p>c. Audit Ketaatan</p> <p>Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB</p> <p>Kegiatan audit lingkup BPPSDMP yaitu:</p> <p>b. Audit Ketaatan pada satker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) SMK PPN Sembawa Provinsi Sumatera Selatan;</li> <li>(2) Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(3) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;</li> <li>(4) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi;</li> </ul>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(5) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Provinsi Kalsel.</p> <p>c. Audit Kinerja pada</p> <p>(1) Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>(2) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>(3) Politeknik Pembangunan Pertanian - Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>(4) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang;</p> <p>(5) Balai Besar pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;</p> <p>(6) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;</p> <p>(7) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi;</p> <p>(8) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan YOMA) Kampus Yogyakarta;</p> <p>(9) Balai Pelatihan Pertanian Lampung;</p> <p>(10) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor;</p> <p>(11) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kampus Magelang, Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(12) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kampus Magelang, Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(13) Balai Besar Pelatihan Kesehhtan Hewan (BBPKH) Cinagara;</p> <p>c. Audit BMN, pada satker</p> <p>(1) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;</p> <p>(2) Politeknik Pem bangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan YOMA) Kampus Yogyakarta;</p> <p>(3) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kampus Magelang, Provinsi Jawa Tengah</p>
2	Pengawasan	<p>Kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat II terdiri atas:</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Ditjen Tanaman Pangan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan SPI pada pada</p> <p>(1) Satker BBPPMBTPH Cimanggis;</p> <p>(2) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan;</p> <p>b. Pengawasan SPI Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada satker Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dan Direktorat Serealida Ditjen Tanaman Pangan</p> <p>c. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko SPBE pada SI PDS dan BanPem TP pada Direktorat Jenderal TP Tahun 2023</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>Kegiatan pengawalan lingkup BPPSDMP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengawalan SPI pada (1) Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP; (2) Sekretariat BPPSDMP;</li> <li>d. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) BPPSDMP</li> </ul>
3	Evaluasi SAKIP	<p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Ditjen TP;</li> <li>(2) BBPPMBTPH; dan</li> <li>(3) BBPOPT Jatisari</li> </ul> <p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 lingkup BPPSDMP pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;</li> <li>(2) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu;</li> <li>(3) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Provinsi Jawa Barat;</li> <li>(4) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;</li> <li>(5) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);</li> <li>(6) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>(7) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;</li> <li>(8) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;</li> <li>(9) BPPSDMP.</li> </ul>
4	Reviu LK	<p>Inspektorat II melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan UAKPA/B dan UAKPA Eselon I periode 31 Des 2023 serta UAKPA/B Eselon I Semester I Tahun 2023 Lingkup Ditjen TP.</p> <p>Reviu Laporan Keuangan pada BPPSDMP yaitu reviu pada Program READSI per 31 Desember 2022, PHLN YESS BPPSDMP per 31 Desember 2022, UAPPA/B-E1 Semester II tahun 2022, UAKPA/B per 30 Juni 2023.</p>
5	Reviu RKAKL	<p>Reviu atas Usulan Revisi DIPA RKA-K/L TA 2023, DIPA II RKA-K/L TA 2023, DIPA III RKA-K/L TA 2023, DIPA III Tahun 2023 Blokir AA, Reviu RKA-KL TA. 2023, DIPA RKA-KL TA 2023, Pagu Indikatif Ditjen TP TA 2024, DIPA VI TA. 2023, DIPA X TA. 2023, DIPA XII TA 2023, Anggaran TA 2023, anggaran buka blokir non <i>automatic adjustment</i> (AA) DIPA RKA KL TA 2023, DIPA RKA-KL Ke X TA. 2023 Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Reviu Pagu Alokasi TA. 2024, usulan Relaksasi <i>automatic adjustment</i> (AA) lingkup Tanaman Pangan.</p>

No	Kegiatan	Uraian
		Reviu Revisi PNPB Dan Revisi RKA-KL, Penambahan Anggaran, Usulan Revisi DIPA RKA.KL TA 2023 lingkup BPPSDMP
6	Pengawasan lainnya	Kegiatan pengawasan lainnya yang mendukung pengawasan internal lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP

### 3. Inspektorat III

Pada awal tahun 2023, Inspektorat III memperoleh anggaran sebesar Rp20.111.872.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp17.061.874.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.875.589.507,00 atau 98,91% dari pagu anggaran Rp17.061.874.000,00. Target *output* 105 laporan dan realisasi *output* 109 laporan atau 103,81%, dengan rincian pada tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7 Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat III

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output	Output	%
1	Audit	3.598.896.000	3.568.356.150	99,15	51	Laporan	51	Laporan	100,00
2	Pengawasan SPIP	1.455.096.000	1.429.003.289	98,21	24	Laporan	24	Laporan	100,00
3	Evaluasi SAKIP Es I	107.964.000	100.891.800	93,45	2	Laporan	3	Laporan	150,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	820.038.000	776.502.696	94,69	16	Laporan	19	Laporan	118,75
5	Layanan Audit Internal Inspektorat III	11.079.880.000	11.000.835.572	99,29	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.061.874.000</b>	<b>16.875.589.507</b>	<b>98,91</b>	<b>105</b>	<b>Laporan</b>	<b>109</b>	<b>Laporan</b>	<b>103,81</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat III yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.8 Rincian Kegiatan Inspektorat III Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit	Kegiatan Audit lingkup Inspektorat III terdiri atas: Kegiatan audit lingkup Ditjen Perkebunan yaitu: a. Audit Kinerja pada satker (1) Dinas Perkebunan (TP-05) Provinsi Riau

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(2) Dinas Perkebunan dan Peternakan (TP-05) Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>(3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>(4) Dinas Perkebunan dan Peternakan (05-TP) Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>(5) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>(6) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>(7) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;</p> <p>(8) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;</p> <p>(9) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>(10) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>(11) Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;</p> <p>(12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (05-TP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>(13) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(14) Dinas Perkebunan (05-TP) Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>(15) Dinas Perkebunan dan Hortikultura (05) Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>b. Audit BMN pada satker</p> <p>(1) BBPPTP Ambon;</p> <p>(2) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak</p> <p>c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023</p> <p>Kegiatan audit lingkup Badan Karantina yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja pada</p> <p>Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru; Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin; Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram; Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; Balai Besar Karantina Pertanian Makassar; Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu Prov. Sulawesi Tengah; Stasiun Karantina Pertanian kls I Parepare; Stasiun Karantina Pertanian kls I Samarinda; Balai Karantina Pertanian kls II Yogyakarta; Balai Karantina Pertanian kls I Balikpapan ; Balai Karantina Pertanian kls I Jambi ; Balai Karantina Pertanian kls I Bandar Lampung; Balai Karantina Pertanian kls II Pangkalpinang; Balai Karantina Pertanian kls II Medan; Balai Karantina Pertanian kls I Semarang; Balai Karantina</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>Pertanian kls I Batam; Balai Karantina Pertanian kls II Tanjung Pinang; Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta; Balai Karantina Pertanian Kls I Palembang; Balai Karantina Pertanian Kls II Gorontalo; Balai Karantina Pertanian Kls I Denpasar; Balai Uji Standar Karantina Pertanian; Balai Karantina Kls II Cilegon; Balai Karantina Kls II Ternate; Stasiun Karantina Pertanian Kls I Bandung; Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina.</p> <p>b. Audit BMN atas Hilangnya Kendaraan Dinas Roda 2 Pada BBKP Soetta</p> <p>c. Audit TIK Pada Barantan</p>
2	Pengawasan	<p>Kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat III terdiri atas:</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan (SPIP) pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan</p> <p>b. Pengawasan SPBE pada Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023</p> <p>c. Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022/2023</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:</p> <p>a. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak; Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram; Balai Karantina Kelas I Semarang; Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya; Balai Besar Karantina Pertanian Makassar; Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang; Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP); Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung; Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin; Balai Besar Karantina Pertanian Belawan; Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap; Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado; Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP); Balai Karantina Pertanian Kls II Pangkal Pinang; Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya; Stasiun Karantina Pertanian Kls I Merauke; Stasiun Karantina Pertanian Kls I Bengkulu; Balai Karantina Pertanian Kls I Balikpapan; Balai Karantina Pertanian Kls I Padang; Balai Karantina Pertanian Kls I Bandar Lampung;</p> <p>b. Pengawasan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Badan Karantina Pertanian</p>

No	Kegiatan	Uraian
3	Evaluasi SAKIP	<p>a. Evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2022</p> <p>b. Evaluasi SAKIP pada Badan Karantina Pertanian; Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru; Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang; Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram; Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam; Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado; Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate; Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang; Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan; Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang; Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta; Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura; Balai Besar Karantina Pertanian Belawan; Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya; Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi; Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;</p> <p>c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Jenderal Kementan TA 2022</p>
4	Reviu LK	<p>a. Reviu LK UAPPA/B E-1 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester II Tahun Anggaran 2022; (2) UAPPA/B E-1 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Semester I Tahun Anggaran 2023</p> <p>b. Reviu LK UAPPA/B-E1 Itjen Semester II Tahun Anggaran 2022, UAPPA/B-E1 Triwulan III Tahun Anggaran 2023, (UAPPA/B) Semester I Tahun Anggaran 2023</p>
5	Reviu RKAKL	<p>a. Reviu RKAKL Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2024; Revisi Pembangunan Nursery SBSN TA. 2023; Relaksasi Automatic Adjustment (AA) Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2023; Reviu atas Usulan Revisi DIPA TA. 2023; Reviu atas <i>Refocussing</i> Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan TA. 2023</p> <p>b. Reviu Revisi Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2023; Realokasi Anggaran Eksternal dan Penyesuaian <i>Automatic Adjustment</i>; Reviu Revisi Target dan Pagu PNPB Lingkup Barantan TA 2023; Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA.2024; Reviu RKA-K/L Belanja Pegawai dan Realokasi TA 2023; Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2024</p>
6	Pengawasan lainnya	Kegiatan pengawasan lainnya yang mendukung pengawasan internal lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal

#### 4. Inspektorat IV

Pada awal tahun 2023, Inspektorat III memperoleh anggaran sebesar Rp20.100.691.000,00 dan direalokasi 1 kali yaitu sebesar Rp3.445.949.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp16.654.742.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.521.368.224,00 atau 99,20% dari pagu anggaran Rp16.654.742.000,00. Target *output* 114 laporan dan realisasi *output* 119 laporan atau 104,39%, dengan rincian pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat IV

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		%
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output	Output	
1	Audit	3.581.196.000	3.564.726.828	99,54	51	Laporan	51	Laporan	100,00
2	Pengawasan SPIP	1.440.096.000	1.425.301.319	98,97	24	Laporan	25	Laporan	104,17
3	Evaluasi SAKIP Es I	88.764.000	88.630.100	99,85	3	Laporan	3	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	438.120.000	437.122.749	99,77	24	Laporan	28	Laporan	116,67
5	Layanan Audit Internal Inspektorat IV	11.106.566.000	11.005.587.228	99,09	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.654.742.000</b>	<b>16.521.368.224</b>	<b>99,20</b>	<b>114</b>	<b>Laporan</b>	<b>119</b>	<b>Laporan</b>	<b>104,39</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat IV yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan rincian pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Rincian Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit	<p>Kegiatan Audit lingkup Inspektorat IV terdiri atas:</p> <p>Kegiatan audit lingkup Ditjen PKH yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja pada satker</p> <p>(1) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>(2) Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa;</p> <p>(3) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>(5) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (06) Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>(6) Dinas Perkebunan dan Peternakan (06) Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>(7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>(8) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>(9) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) Provinsi Lampung;</p> <p>(10) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>(11) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (06);</p> <p>(13) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (06);</p> <p>(14) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>(15) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (06);</p> <p>(16) Dinas Pertanian (DK-04) Provinsi Banten;</p> <p>(17) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>(18) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (06);</p> <p>b. Audit <i>Blacklist</i> pada Balai Inseminasi Buatan Lembang; Balai Embrio Ternak Cipelang; BPTU-HPT Pelaihari; Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar; Pengadaan Bantuan Ternak Babi Pada Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar</p> <p>Kegiatan audit lingkup Sekretariat Jenderal yaitu:</p> <p>a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Audit BMN atas Hilangnya Kendaraan Dinas Roda 2 Pada BBKP Soetta.</p> <p>Kegiatan audit lingkup BSIP yaitu:</p> <p>a. Audit Kinerja pada satker</p> <p>(1) Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan Provinsi Jabar;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(2) Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan);</p> <p>(3) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;</p> <p>(4) Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura;</p> <p>(5) Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor;</p> <p>b. Audit BMN pada:</p> <p>(1) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;</p> <p>(2) Balai Pengujian Standar Instrumen Veteriner;</p> <p>(3) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian/Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p>
2	Pengawasan	<p>Kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat IV terdiri atas:</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Ditjen PKH sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan Manajemen Risiko (MR) terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak (Simponi-Ternak) dan Aplikasi Sistem Informasi Rekomendasi Perizinan (Simrek) PKH pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;</p> <p>b. Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada</p> <p>(1) Satker Balai Veteriner (BVet) Banjarbaru Kalimantan Selatan;</p> <p>(2) Satker Balai Veteriner Lampung Balai Veteriner Bukittinggi;</p> <p>(3) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Unggul (BPTU HPT) Indrapuri Provinsi Aceh.</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal yaitu Pengawasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Pada Satker Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Tahun 2023</p> <p>Kegiatan pengawasan lingkup BSIP sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan pada</p> <p>(1) Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Prov. Nusa Tenggara Barat;</p> <p>(2) BPSI Tanaman Serealia Prov. Sulawesi Selatan;</p> <p>(3) Balai Pengujian Standar Instrumen/BPSI Tanaman Palma Prov. Sulawesi Utara;</p> <p>(4) Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Tanaman Kacang;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(5) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI JESTRO);</p> <p>(6) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran Lembang;</p> <p>(7) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi Siddenreng Rappang Prov Sulawesi Selatan;</p> <p>(8) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Prov. Kalimantan Selatan;</p> <p>(9) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Bogor;</p> <p>(10) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman; dan Pemanis dan Serat Malang Jawa Timur;</p> <p>(11) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Prov. Nusa Tenggara Timur;</p> <p>(12) Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan Bogor Jawa Barat; dan</p> <p>(13) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat</p>
3	Evaluasi SAKIP	<p>Kegiatan evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat IV terdiri atas:</p> <p>a. Evaluasi SAKIP lingkup PKH dilakukan pada:</p> <p>(1) Balai Veteriner Medan;</p> <p>(2) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH);</p> <p>(3) Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar Provinsi Bali;</p> <p>(4) BBPTUHPT Baturraden Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>(5) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Evaluasi SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal dilakukan pada:</p> <p>(1) Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA);</p> <p>(2) Pusat Perlingungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;</p> <p>(3) Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian Tahun 2022</p> <p>c. Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</p>
4	Reviu LK	<p>Kegiatan reviu LK lingkup Inspektorat IV terdiri atas:</p> <p>a. Reviu LK lingkup Ditjen PKH dilakukan</p> <p>(1) Reviu LK Semeseter II UAKPA/B Per 31 Desember 2022;</p> <p>(2) Reviu LK UAPPA/B-E1 per 31 Desember 2022;</p> <p>(3) Reviu LK Semeseter I UAKPA/B Per 30 Juni 2023;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(4) Reviu LK UAPPA/B-E1 per 30 Juni 2023;                      (5) Reviu LK UAPPA/B-E1 Triwulan III Tahun 2023</p> <p>b. Reviu LK lingkup Sekretariat Jenderal dilakukan</p> <p>(1) Reviu LK UAPA/B Kementan (BA.018) Semester II Tahun Anggaran 2022;                      (2) Reviu LK (UAPPA/B) Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Semester II TA. 2022;                      (3) Reviu PIPK UAPPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;                      (4) Reviu PIPK UAPPA Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;                      (5) Reviu LK Semester I Tahun 2023 (UAPPA/B);                      (6) Reviu UAPA/B Triwulan III TA. 2023</p> <p>c. Reviu LK lingkup Inspektorat Jenderal dilakukan:</p> <p>(1) Reviu LK UAPPA/B-E1 Itjen Semester II Tahun Anggaran 2022,                      (2) Reviu LK UAPPA/B-E1 Triwulan III Tahun Anggaran 2023;                      (3) Reviu UAPPA/B Semester I Tahun Anggaran 2023</p>
5	Reviu RKAKL	<p>Kegiatan reviu RKAKL lingkup Inspektorat IV terdiri atas:</p> <p>a. Reviu RKAKL lingkup Ditjen PKH yaitu</p> <p>(1) Reviu Atas Revisi DIPA II TA. 2023;                      (2) Reviu Realokasi Anggaran TA. 2023;                      (3) Reviu Dokumen Usulan Pembukaan Blokir Anggaran TA. 2023;                      (4) Reviu Pagu Anggaran RKA-K/L TA. 2024;                      (5) Reviu Pagu Alokasi RKAK/L TA. 2024;                      (6) Reviu focusing Anggaran Tahun 2023</p> <p>b. Reviu RKAKL lingkup BSIP yaitu</p> <p>(1) Reviu RKA K/L Pagu Indikatif TA. 2024;                      (2) Reviu Usulan revisi (RKA-K/L) TA. 2023;                      (3) Reviu Pagu Alokasi Anggaran TA. 2024;                      (4) Usulan Realokasi Anggaran TA. 2023</p> <p>c. Reviu RKAKL lingkup Itjen yaitu</p> <p>(1) Reviu Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Kementan TA. 2024;                      (2) Reviu pagu Alokasi T.A 2024;                      (3) Reviu Pemanfaatan Kelebihan Belanja Pegawai TA. 2023,                      (4) Reviu RKA-K/L dalam Rangka Refocusing Anggaran Kementerian Pertanian TA. 2023</p>

No	Kegiatan	Uraian
6	Pengawasan lainnya	Kegiatan pengawasan lainnya yang mendukung pengawasan internal lingkup Ditjen PKH, BSIP, dan Inspektorat Jenderal

## 5. Inspektorat Investigasi

Pada awal tahun 2023, Inspektorat Investigasi memperoleh anggaran sebesar Rp16.658.601.000,00 dan direalokasi 1 kali sehingga anggaran menjadi Rp14.058.601.000,00.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.250.151.627,00 atau 94,25% dari pagu anggaran Rp14.058.601.000,00. Target *output* 72 laporan dan realisasi *output* 82 laporan atau 113,89%, dengan rincian pada tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat Investigasi

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		Pagu
		Rp	Rp	Rp	Output	Rp	Rp	Rp	
1	Audit dengan Tujuan Tertentu	4.427.700.000	4.385.984.000	99,06	60	Laporan	70	Laporan	116,67
2	Audit Internal Inspektorat Investigasi	9.630.901.000	8.864.167.627	92,04	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.058.601.000</b>	<b>13.250.151.627</b>	<b>94,25</b>	<b>72</b>	<b>Laporan</b>	<b>82</b>	<b>Laporan</b>	<b>113,89</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat Investigasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Rincian Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit Tujuan Tertentu (ATT)	Inspektorat Investigasi telah melaksanakan Audit Tujuan Tertentu selama tahun 2023 yaitu: Pengumpulan Data Bahan ATT, berupa: (1) kegiatan penatausahaan tugas belajar pada unit kerja Setjen, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP, Ditjen Tanaman Pangan, Barantan, BSIP, Ditjen perkebunan, Ditjen PKH, BPPSDMP, Pusat Standarisasi Instrument Tanaman Pangan Bogor, PSEKP Bogor, PPMKP Ciawi, dan BET Cipelang);

No	Kegiatan	Uraian
		<p>(2) Perencanaan pengelolaan pegawai eks Badan Litbang dan eks BKP;</p> <p>(3) Perencanaan Pengelolaan Aset Eks Badan Litbang dan eks BKP pada Sekjen dan BBLITVET Bogor;</p> <p>(4) Perencanaan pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri Lingkup Kementan pada Sekretariat Jenderal dan Polbangtan.</p> <p>a. ATT atas Pengaduan Masyarakat terkait:</p> <p>(1) Pupuk Bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat;</p> <p>(2) Seleksi Jasa Konsultan pada BPPSDMP;</p> <p>(3) Pembangunan Ruang Pusat Pengendalian dan Monitoring Pada Ditjen PSP;</p> <p>(4) Peredaran Pupuk dan Pestisida di Provinsi Bali, Jawa Barat, NTB, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Jawa Barat;</p> <p>(5) Kegiatan UPPO TA 2022 pada 28 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bandung, Garut, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Karo, Kabupaten Pali, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Kupang, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada bulan Agustus dan September 2023;</p> <p>b. ATT Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2022, yaitu:</p> <p>(1) Pembangunan Fisik pada BPTU-HPT Siborongborong, dan</p> <p>(2) Pekerjaan Fisik pada BPTU-HPT Baturraden Jateng;</p> <p>c. ATT atas permintaan aparat penegak hukum, terkait:</p> <p>(1) Pengadaan Itik dan Pakan Ternak di BPTU Pelaihari, dan</p> <p>(2) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana di Kab.Lumajang;</p>

No	Kegiatan	Uraian
		ATT atas instruksi pimpinan terkait: (1) Tugas Belajar di Polbangtan Bogor, Pustaka dan Literasi Pertanian Bogor, BPSI Tanaman Sayuran Lembang, Ditjen Hortikultura dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; (2) Kepatuhan LHKPN Penyelenggara Negara Ditjen PKH dan Ditjen Hortikultura; (3) Pemasukan Daging dan Sapi Bakalan pada Ditjen PKH dan PPVTP; (4) Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen.
2	Audit Investigasi	Inspektorat Investigasi telah melaksanakan Audit Investigasi sebanyak dua kali selama Tahun 2023 yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah dan Jambi.
3	Pengawasan lainnya	Kegiatan pengawasan lainnya yang mendukung pengawasan internal, antara lain : a. Penilaian dan Evaluasi ZI/WBK-WBBM. Inspektorat Investigasi telah melaksanakan penilaian dan evaluasi ZI/WBK-WBBM pada (1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (2) Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Bogor; (3) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan; (4) Polbangtan Yogyakarta Magelang; (5) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi; (6) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang; (7) BBPP Ketindan; (8) BBPP Batu; (9) BBPP Binuang; (10) BBPP Kupang; (11) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari; (12) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis; (13) Balai Besar Pengembangan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden; (14) Balai Besar Veteriner Denpasar; (15) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor; (16) Balai Veteriner Medan; (17) Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan;

No	Kegiatan	Uraian
		(18) BBKP Soekarno Hatta; (19) BBKP Surabaya; (20) Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Bekasi; (21) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kls I Batam; (22) BKP Kls I Pekanbaru; (23) BKP Kls I Jambi; (24) BKP Kls II Mataram; (25) BKP Kls I Kupang; (26) BKP Kls I Manado; (27) BKP Kls I Ternate; (28) BKP Kls I Jayapura; (29) BKP Kls II Tanjung Pinang; (30) BKP Kls II Tarakan.  b. Kegiatan Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian; c. Peningkatan Kapasitas SDM; d. Telaah Regulasi; dan e. Kegiatan Pemasarakatan Anti Korupsi (HAKORDIA).

### C. Capaian Anggaran dan *Output* lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pada awal tahun 2023, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh anggaran sebesar Rp16.658.601.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp42.440.710.623,00. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp42.440.710.623,00 atau sebesar 95,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang meliputi Kelompok Perencanaan; Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat (OKHH); Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan (PHPEP), dan Bagian Umum.

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

## 1. Kelompok Perencanaan

Kelompok Perencanaan terdiri dari Tim Kerja Program dan Kerjasama Pengawasan dan Tim Kerja Anggaran. Pada awal tahun 2023, Kelompok Perencanaan memperoleh anggaran sebesar Rp6.057.462.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp5.639.251.000,00.

Realisasi anggaran Kelompok Perencanaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.212.091.436,00 atau 92,43% dari pagu anggaran Rp5.639.251.000,00, realisasi *output* 12 dokumen atau 100,00% dari target *output* 12 dokumen, dengan rincian seperti tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Capaian Anggaran dan *Output* Kelompok Perencanaan

Kode	Kegiatan	Anggaran			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1760. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
	053. Penyusunan Rencana Program	273.101.000	259.430.592	94,99			
	054. Penyusunan Rencana Anggaran	5.366.150.000	4.952.660.844	92,29			
	<b>Total</b>	<b>5.639.251.000</b>	<b>5.212.091.436</b>	<b>92,43</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Perencanaan dan telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

### 1) Anggaran

Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal melakukan revisi sebanyak 19 kali yang meliputi Revisi DIPA DJA, Revisi KPA, Revisi DIPA Kanwil.

### 2) Perjanjian Kinerja

Tahun 2023, dengan adanya perubahan pada anggaran dan pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal, berdampak pada Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I, II, III dan IV lingkup Inspektorat Jenderal. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat Jenderal telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja Awal

b. Perjanjian Kinerja Revisi I

Perjanjian Kinerja Revisi I dilakukan tanggal 16 Januari 2023 menindaklanjuti adanya pergantian pejabat pada jabatan Inspektur II, Inspektur III, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal.

c. Perjanjian Kinerja Revisi II

Perjanjian Kinerja Revisi II dilakukan menindaklanjuti adanya pergantian pejabat pada jabatan Pit. Inspektur I pada tanggal 3 April 2023 dan Kepala Bagian Umum pada tanggal 1 Maret 2023.

d. Perjanjian Kinerja Revisi III

Perjanjian Kinerja Revisi III dilakukan menindaklanjuti adanya pergantian pejabat pada jabatan Pit. Inspektur I pada tanggal 15 September 2023.

e. Perjanjian Kinerja Revisi IV

Perjanjian Kinerja Revisi IV dilakukan menindaklanjuti adanya pergantian pejabat pada jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi pada tanggal 16 Agustus 2023.

f. Perjanjian Kinerja Revisi V

Perjanjian Kinerja Revisi V dilakukan menindaklanjuti adanya pergantian jabatan Menteri Pertanian per tanggal 25 Oktober 2023 sehingga perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

g. Perjanjian Kinerja Revisi VI

Perjanjian Kinerja Revisi VI dilakukan menindaklanjuti adanya pergantian jabatan Inspektorat Jenderal per tanggal 1 November 2023 serta jabatan Plt. Inspektor I dan Plt. Inspektor Investigasi per tanggal 14 November 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja eselon I dan eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

h. Perjanjian Kinerja Revisi VII

Perjanjian Kinerja Revisi VII dilakukan menindaklanjuti adanya refocusing anggaran yang menyebabkan perubahan pagu anggaran Inspektorat Jenderal. Revisi dilaksanakan pada perjanjian kinerja Inspektorat I, II, III, IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

3) Koordinasi Pengawasan

Salah satu tugas Kelompok Perencanaan melakukan koordinasi pengawasan. Dalam Memenuhi tugas tersebut telah dilakukan koordinasi pengawasan dengan 33 Inspektorat Daerah Provinsi di Indonesia kecuali dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya pada bulan Agustus, November dan Desember 2023. Koordinasi pengawasan ini tak lain untuk mewujudkan terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta mengoptimalkan pengawalan dan pengawasan seluruh program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya. PKPT Tahun 2024 yang telah disusun memuat satker/UPT yang akan

diperiksa dengan mengelompokkan berdasarkan faktor resiko yaitu lokasi, besarnya anggaran, frekuensi pemeriksaan sebelumnya, prioritas terhadap kegiatan utama Kementerian Pertanian, dan sudah/belum dilakukan Pengawasan SPIP terhadap satker tersebut.

## 2. Kelompok Keuangan dan BMN

Kelompok Keuangan dan BMN terdiri dari Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja Barang Milik Negara. Realisasi anggaran Kelompok Keuangan dan BMN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp28.6625.384.055,00 atau 96,62% dari pagu anggaran Rp29.627.216.000,00, realisasi *output* 24 layanan atau 100,00% dari target *output* 12 dokumen, dengan rincian seperti tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Capaian Anggaran dan *Output* Kelompok Keuangan dan BMN

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBA. 962	Layanan Umum						
	051. Pengelolaan Keuangan	26.691.489.000	25.759.895.213	95,55	12	12	100,00
	052. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.935.727.000	2.865.488.842	97,61	12	12	100,00
	<b>Total</b>	<b>29.627.216.000</b>	<b>28.625.384.055</b>	<b>96,62</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

- 1) Tim Kerja Keuangan
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
  - b. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp148.650.007,00 atau mencapai 991 persen dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp15.000.000,00. Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 adalah

- senilai Rp127.765.411.183,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran senilai Rp131.030.528.000,00.
- c. Neraca TA. 2023 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan senilai Rp8.505.797.156,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp450.214.929,00 Aset Tetap (*netto*) senilai Rp7.860.839.145,00, dan Aset Lainnya (*netto*) senilai Rp194.743.082,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp27.651.791,00 dan Rp8.478.145.365,00.
  - d. Laporan Operasional (LO) TA 2023 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp4.518.018,00, sedangkan jumlah Beban Operasional senilai Rp128.902.124.969,00 sehingga Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp128.897.606.951,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp93.431.989,00 dan nihil, sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp128.804.174.962,00.
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah Rp11.039.122.682,00 ditambah Defisit-LO senilai Rp12.804.174.962,00 ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp126.243.197.645,00 sehingga terdapat Penurunan Ekuitas senilai Rp2.560.977.317,00 dan menghasilkan Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp8.478.145.365,00.
  - f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2023 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan menggunakan Basis Kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk TA 2023 disusun dan disajikan dengan Basis AkruaI.

2) Tim Kerja Barang Milik Negara TA. 2023

Nilai BMN Gabungan (*Intrakomptabel* dan *Ekstrakomptabel*) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.495.844.250,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp11.067.135.065,00 (Sebelas Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), serta nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode pelaporan per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.769.455.557,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp7.340.746.372,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Nilai BMN Gabungan (*Intrakomptabel* dan *Ekstrakomptabel*) secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Nilai BMN Gabungan (*Intrakomptabel* dan *Ekstrakomptabel*)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
<b>I. INTRAKOMPTABEL</b>	<b>11.059.179.465</b>	<b>4.769.455.557</b>	<b>7.336.854.572</b>	<b>8.491.780.450</b>
Barang Konsumsi	541.957.735	946.093.562	1.052.459.074	435.592.223
Bahan untuk Pemeliharaan	520.000	2.230.000	2.144.000	606.000

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Persediaan Lainnya	0	2.456.100	2.456.100	0
Peralatan dan Mesin	40.144.672.434	2.389.785.673	794.938.499	41.739.519.608
Gedung dan Bangunan	329.071.000	0	0	329.071.000
Jaringan	164.500.000	0	0	164.500.000
Aset Tetap dalam Renovasi	0	922.790.281	922.790.281	0
Aset Tetap Lainnya	107.231.970	0	0	107.231.970
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	277.090.500	277.090.500	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.404.921.384)	0	3.920.296.114	(34.325.217.498)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.508.305)	0	7.001.510	(45.509.815)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(38.500.000)	0	15.400.000	(53.900.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(54.856.120)	0	0	(54.856.120)
Software	3.157.462.528	229.009.441	0	3.386.471.969
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pem	0	0	0	0
Akumulasi Amortisasi software	(2.849.450.393)	0	342.278.494	(3.191.728.887)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0
<b>II. EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>7.955.600</b>	<b>0</b>	<b>3.891.800</b>	<b>4.063.800</b>
Peralatan dan Mesin	119.445.925	0	0	119.445.925
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(111.490.325)	0	3.891.800	(115.382.125)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0	0
<b>III. GABUNGAN</b>	<b>11.067.135.065</b>	<b>4.769.455.557</b>	<b>7.340.746.372</b>	<b>8.495.844.250</b>
Barang Konsumsi	541.957.735	946.093.562	1.052.459.074	435.592.223
Bahan untuk Pemeliharaan	520.000	2.230.000	2.144.000	606.000
Persediaan Lainnya	0	2.456.100	2.456.100	0
Peralatan dan Mesin	40.264.118.359	2.389.785.673	794.938.499	41.858.965.533
Gedung dan Bangunan	329.071.000	0	0	329.071.000
Jaringan	164.500.000	0	0	164.500.000
Aset Tetap dalam Renovasi	0	922.790.281	922.790.281	0
Aset Tetap Lainnya	107.231.970	0	0	107.231.970
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	277.090.500	277.090.500	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.516.411.709)	0	3.924.187.914	(34.440.599.623)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.508.305)	0	7001510	(45.509.815)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(38.500.000)	0	15400000	(53.900.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(54.856.120)	0	0	(54.856.120)
Software	3.157.462.528	229009441	0	3.386.471.969
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0	0
Akumulasi Amortisasi software	(2.849.450.393)	0	342.278.494	(3.191.728.887)

### 3. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum

Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri dari Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Tim Kerja Hukum. Pada awal tahun 2023, Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum memperoleh anggaran sebesar Rp2.239.204.000,00 dan dilakukan revisi sehingga anggaran menjadi Rp2.722.572.000,00.

Realisasi anggaran Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.687.674.089,00 atau 98,72% dari pagu anggaran Rp2.722.572.000,00 realisasi *output* 12 dokumen atau 100,00% dari target *output* 12 dokumen, dengan rincian seperti tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Capaian Anggaran dan *Output* Kelompok Humas dan Hukum

Kode	Kegiatan	Anggaran			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1760. EBA. 960	Pengelolaan Hukum, Humas dan Protokol	2.722.572.000	2.687.674.089	98,72	12	12	100,00

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Humas dan Hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

1) Pengembangan *Website* Inspektorat Jenderal

Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengembangan terhadap tampilan dan desain. *Website* Inspektorat Jenderal dikelola oleh tim *website* yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor B-18/Kpts/OT.050/G/01/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Media Elektronik/*Website*. Konten yang diupload ke *website* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 terdiri dari 102 konten berita, 16 Dokumen Informasi Publik, dan 3 regulasi/pedoman.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tahun 2023 diadakan pengembangan atas *Whistleblowing System* (WBS) dan akan dilink melalui *website* Itjen: URL <https://itjen.pertanian.go.id/>



Gambar 4.1 Tampilan Website Itjen Kementan

## 2) Pengelolaan Media Sosial

Dalam rangka mempublikasikan informasi terkait keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian perlu dilakukan penderasan informasi melalui berbagai media sosial. Media penderasan informasi terkait pencapaian pembangunan pertanian Inspektorat Jenderal antara lain melalui:

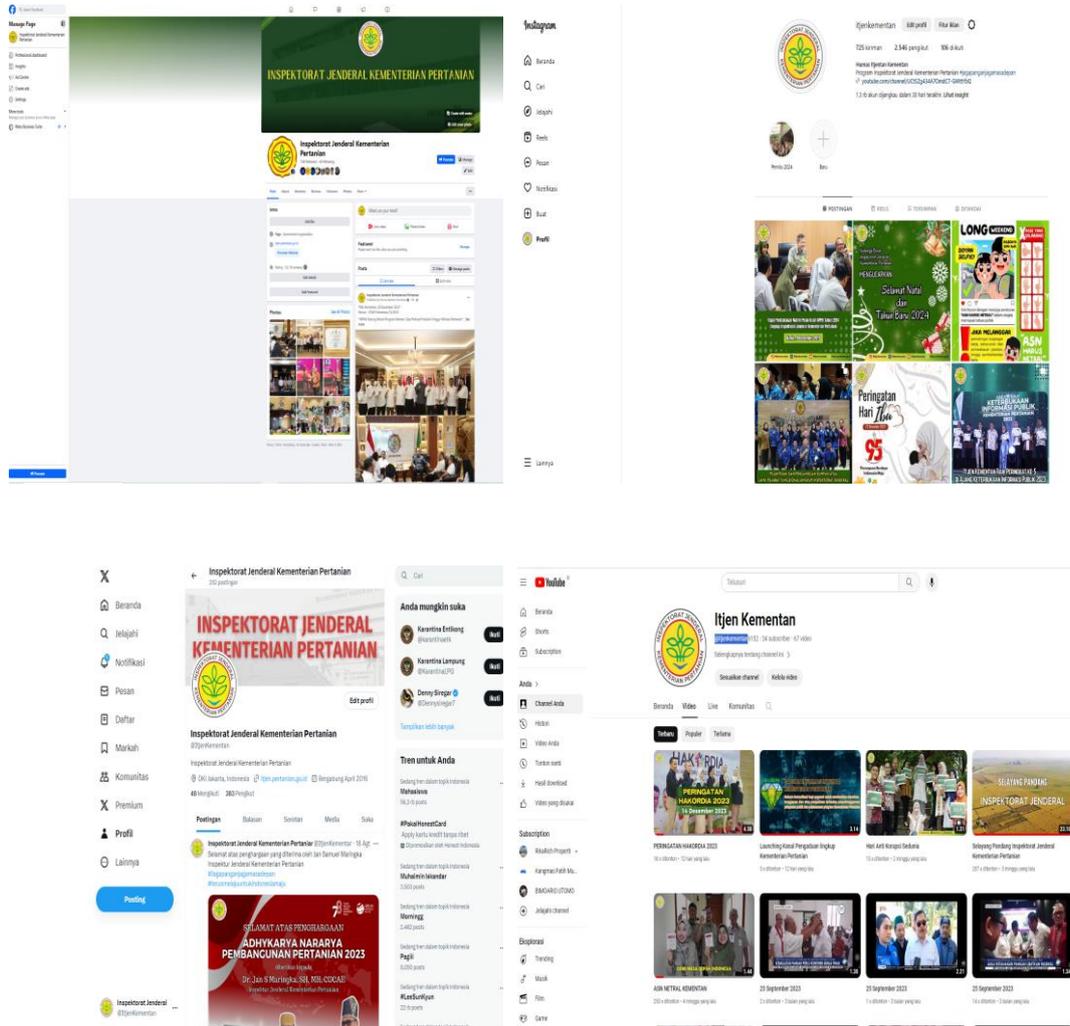
- Facebook : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Instagram : itjenkementan
- Twitter : @itjenkementan
- Youtube : @itjenkementan

Pada tahun 2023, jumlah penderasan informasi melalui media sosial tahun 2023 terdiri dari:

- Media Sosial Facebook  
Penderasan informasi melalui Facebook sebanyak 296 tautan dengan perolehan jangkauan orang sebanyak 70.599, 3.130 tautan yang disukai, 282 komentar dan 183 berbagi tautan.

- Media Sosial Instagram

Penderasan informasi melalui Instagram sebanyak 175 tautan dengan perolehan 3.124 tautan yang disukai.



Gambar 4.2 Konten yang Diunggah di Media Sosial FB, IG, Twitter dan Youtube

3) Pengelolaan Aplikasi LAPOR!

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pasal 3 Ayat (1) bahwa Setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan layanan publik dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 24/Kpts/OT.050/G/01/2022 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan pengaduan *Online* Rakyat lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023 pengaduan yang masuk melalui

aplikasi LAPOR! <https://www.lapor.go.id/> sebanyak 68 pengaduan dan telah ditindaklanjuti semua.

#### 4) Penerbitan Media Auditor

Media auditor merupakan sarana *sharing knowledge* dalam memberikan informasi terkait pengawasan pembangunan pertanian serta membudayakan dan mengembangkan etika, moral dan sistem pengawasan melalui pembinaan pengawasan serta pengembangan profesi, sehingga perlu diterbitkan Media Auditor sebagai media informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Redaksi media auditor Inspektorat Jenderal didukung dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor 18/Kpts/OT.050/G/01/2023 tentang Pengurus Media Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 11 Januari 2023, dikarenakan terjadinya mutase pimpinan, maka Surat Keputusan diperbaharui menjadi nomor 3942/Kpts/OT.050/G/11/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 18/Kpts/OT.050/G/01/2023 tentang Pengurus Media Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 7 November 2023.

Tahun 2023 Media Auditor terbit sebanyak 3 edisi yaitu edisi 62,63 dan 64. Setiap terbit media auditor mengakat tema yang terkait dengan peran pengawasan untuk menunjang program strategis, super prioritas dan prioritas di lingkungan Kemeterian Pertanian antara lain:

- a. Edisi 62 terbit bulan Mei 2023 tema: Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia.
- b. Edisi 63 terbit September 2023 tema: Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa
- c. Edisi 64 terbit Desember 2023 tema: Optimalisasi Peran Itjen dalam Membangun Sistem Pengendalian Integritas pada Program/Kegiatan Strategis dan Layanan Pertanian.

Setiap edisi media auditor dicetak sebanyak 300 eksemplar dan distribusikan kepada unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian baik di pusat maupun di daerah serta *stakeholder* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian antara lain 34 Inspektorat Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Deputi, 34 Inspektorat Provinsi, dan Lembaga Pengawasan seperti BPK RI, BPKP dan KPK.

Tabel 4.17 Jumlah Artikel Media Auditor Tahun 2023

No	Edisi	Artikel						Total Artikel
		Editorial	Menu Utama	Wawasan	Info Media	Info Kesehatan	Pojok Anti Korupsi	
1	Edisi 62	1	3	11	6	1	1	23
2	Edisi 63	1	2	10	10	1	1	25
3	Edisi 64	1	3	7	8	1	1	21

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, diperoleh informasi bahwa jumlah artikel terbanyak terdapat pada 25 artikel pada edisi 63, 23 artikel pada edisi 62 sedangkan 21 artikel pada edisi 64. Penurunan minat penulis diakibatkan terbitnya Permenpan 01/2023 tentang Jabatan fungsional. Bahwa fungsional tertentu tidak perlu lagi mengumpulkan daftar usulan penetapan angka kredit (Dupak).

#### 5) Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan

Peliputan adalah kegiatan membuat laporan atau berita, dalam bentuk naskah berita, foto kegiatan, maupun rekaman gambar/suara, tentang peristiwa maupun kegiatan terkini baik pejabat negara maupun satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023 peliputan kegiatan Itjen antara lain: Peliputan Rakorwas di seluruh provinsi Indonesia, Dialog Jaga Pangan di daerah perbatasan Indonesia dari sabang sampai Merauke yang berjumlah sebanyak 55 peliputan.



Gambar 4.3 Peliputan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

## 6) Pengelolaan Informasi Publik

Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Inspektorat Jenderal sebagai salah satu Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah dan dikuatkan dengan “Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik” oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 30 Januari 2023 sebagai upaya tercapainya visi dan misi PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Permohonan informasi yang masuk melalui PPID pelaksana Inspektorat Jenderal periode tahun 2023 sebanyak 91 dari pihak *internal* dan 34 dari pihak *eksternal*.

Tahun 2023 PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal mengikuti kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Hasil penilaian tahap pertama



Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian masuk kedalam kategori informatif dengan nilai 92.1. Penilaian tahap kedua yaitu visitasi dan wawancara. visitasi telah dilakukan oleh tim penilai pada tanggal 17 November 2023. Hasil penilaian tahap ketiga adalah Penganugerahan Pemeringkatan

Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal mendapatkan peringkat ke V dengan kategori "INFORMATIF"

## 7) Pengelolaan Pemberitaan

Fungsi utama pemberitaan adalah untuk melaporkan atau memberi tahu sesuatu hal kepada khalayak dan seluruh informasi yang diberitakan harus diperhitungkan nilai gunanya bagi kepentingan masyarakat. Pemberitaan atau reportase juga mempunyai makna melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan. Pemberitaan mencakup kegiatan meliputi, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai sumber/narasumber, kemudian menuliskannya dalam bentuk berita. Tim Humas Inspektorat Jenderal sebelum melakukan penderasan terhadap pemberitaan kegiatan Inspektorat Jenderal terlebih dahulu memilih, mengolah serta lalu menerbitkan pemberitaan melalui media online maupun media elektronik. Pemberitaan melalui media elektronik ditayangkan melalui TV lokal dan TV swasta Nasional seperti TVRI, Metro

TV, TV One, RCTI, SCTI, Trans TV, I News TV, MNC News. Pemberitaan yang diterbitkan oleh Humas Itjen selama tahun 2023 sebanyak 431 *online* dan 47 elektronik.

8) Penyusunan Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian serta Keputusan Inspektur Jenderal

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kita harus dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas mengenai apa yang menjadi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baik yang sudah ataupun yang sedang kita laksanakan. Terkait hal tersebut perlu disusun dasar hukum untuk dapat menguatkan program/kebijakan lingkup Inspektorat Jenderal dan Kementerian Pertanian. Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Tim Hukum pada tahun 2023 yaitu 1 Kepmentan, 48 SK Irjen, 29 SK KPA, dan 3 MoU.

9) Penelaahan Perundang-undangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Bahwa Ketua Tim Hukum mempunyai tugas antara lain: Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Tim Hukum Itjen melakukan penelaahaan kasus hukum pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus.

10) Penilaian Karya Tulis Ilmiah

Karya Tulis Ilmiah di bidang pengawasan adalah karya tulis ilmiah yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dalam bidang pengawasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui idetifikasi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya sebagai media bagi

auditor untuk mengembangkan profesionalitas, mengkomunikasikan gagasan dan pengetahuan yang dimiliki.

Adapun ketentuan pendukung terkait lainnya yang menjadi payung hukum pelaksanaan penilaian KTI adalah Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan. Penilai terhadap Karya Tulis Ilmiah (KTI) ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 51/KPTS/OT.160/G/01/2023 tentang Tim Penguji Teknis Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Auditor Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sesuai ketentuan pedoman pengujian karya tulis ilmiah, bahwa hasil penilaian terhadap Karya Tulis Ilmiah *passing grade* sama dengan atau lebih besar dari 2,5, sehingga dengan hasil penilaian tersebut karya tulis ilmiah dapat diajukan sebagai persyaratan pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit (dupak). Pada tahun 2023 jumlah karya tulis ilmiah yang akan dilakukan pengujian sebanyak 20 KTI dan diperoleh hasil sebanyak 18 KTI yang memenuhi *passing grade* untuk diajukan pengujiannya dan 2 KTI yang tidak memenuhi *passing grade*.

#### **4. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan dan Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan. Realisasi anggaran Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.540.208.819,00 atau 94,24% dari pagu anggaran Rp3.756.626.000,00 realisasi *output* 24 dokumen atau 100,00% dari target *output* 24 dokumen, dengan rincian seperti tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18 Capaian Anggaran dan *Output* Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Kode	Kegiatan	Anggaran			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1760. EBA. 963	Layanan Data dan Informasi						
	051. Layanan Data dan Informasi	2.553.166.000	2.476.294.056	96,99	12	12	100,00
1760. EBD. 953	Layanan Monitoring dan Evaluasi						
	051. Layanan Monitoring dan Evaluasi	1.203.460.000	1.063.914.763	88,40	12	12	100,00
<b>Total</b>		<b>3.756.626.000</b>	<b>3.540.208.819</b>	<b>94,24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

1) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP dan BPK-RI. Tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah untuk mendorong auditan (obyek pemeriksaan) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, baik yang berupa rekomendasi yang bersifat administratif, substansi teknis, ketatalaksanaan maupun rekomendasi kerugian negara untuk disetorkan ke Kas Negara. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikemukakan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal hingga per 31 Desember 2023 diketahui bahwa hasil pengawasan dalam interval tahun 2016-2023 terdapat 61.036 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 54.925 rekomendasi (89,99%) sehingga sisa rekomendasi sebanyak 6.111

rekomendasi (10,01%). Berikut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal secara rinci pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19 Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjentan Tahun 2016-2023

No	Eselon I	Rek.	TL	Sisa	% TL
1	Sekretariat Jenderal	4.299	3.873	426	90,09
2	Inspektorat Jenderal	416	400	16	96,15
3	Ditjen Tanaman Pangan	7.445	6.539	906	87,83
4	Ditjen Hortikultura	7.316	6.659	657	91,02
5	Ditjen Perkebunan	6.057	5.287	770	87,29
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.372	7.399	973	88,38
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.852	4.561	291	94,00
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	12.891	11.892	999	92,25
9	BPPSDMP	5.022	4.383	639	87,28
10	Badan Karantina Pertanian	4.366	3.932	434	90,06
<b>Jumlah</b>		<b>61.036</b>	<b>54.925</b>	<b>6.111</b>	
		<b>%</b>	<b>89,99</b>	<b>10,01</b>	

Berdasarkan tabel 4.19 di atas diketahui bahwa dari 10 Eselon I di Kementerian Pertanian, terdapat 61.036 rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal periode pengawasan tahun 2016-2023. Dari 61.036 rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti sebanyak 54.925 rekomendasi atau 89,99% yang telah ditindaklanjuti sehingga masih terdapat sisa rekomendasi sebanyak 6.111 rekomendasi atau 10,11% dari total rekomendasi.

b. Hasil Pemeriksaan BPKP

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan diketahui bahwa terdapat 279 LHP yang ditujukan pada Kementerian Pertanian dengan jumlah saldo temuan 546 temuan. Setelah dilakukan sinkronisasi data hasil pemeriksaan BPKP diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.20 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPKP

No	Eselon I	Jumlah LHP	Jumlah Saldo Temuan
1	Sekretariat Jenderal	33	50
2	Inspektorat Jenderal	-	-
3	Ditjen Tanaman Pangan	76	160
4	Ditjen Hortikultura	7	11
5	Ditjen Perkebunan	6	12

No	Eselon I	Jumlah LHP	Jumlah Saldo Temuan
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	7
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	65	130
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	7	16
9	BPPSDMP	44	104
10	Badan Karantina Pertanian	1	1
<b>Total</b>		<b>245</b>	<b>491</b>
<b>BKP/Bapanas</b>		<b>18</b>	<b>36</b>
<b>Tidak Teridentifikasi</b>		<b>18</b>	<b>25</b>
<b>Jumlah Seluruhnya</b>		<b>279</b>	<b>546</b>

Dari 279 LHP BPKP telah teridentifikasi sebanyak 245 LHP per Eselon I dengan sisa saldo temuan sebanyak 491 temuan, 18 LHP diidentifikasi milik BKP/Bapanas dengan saldo temuan sebanyak 36 temuan, dan masih terdapat 18 LHP dengan 25 saldo temuan yang belum teridentifikasi ditujukan ke Eselon I terkait.

c. Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hasil Pemeriksaan BPK RI per 8 Januari 2024 diketahui bahwa terdapat 1.921 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertanian. *Progres* hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK

Uraian/Status	Periode									
	1 April 2022		24 Agustus 2022		4 Juli 2023		19 Agustus 2023		8 Januari 2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah rekomendasi	1.708		1.782		1.782		1.843		1.921	
a. Sesuai	1.324	77,52	1.433	80,42	1.484	83,28	1.545	83,83	1.545	80,43
b. Belum Sesuai	253	14,81	238	13,36	233	13,08	231	12,53	231	12,02
c. Belum TL	69	4,04	46	2,58	-	-	2	0,11	80	4,16
d. TPTD	62	3,63	65	3,65	65	3,65	65	3,53	65	3,38
e. Penyelesaian	1.386	81,15	1.498	84,06	1.549	86,92	1.610	87,36	1.610	83,81
Progress			112	2,92	51	5,78	61	0,43	-	3,55

Dari 1.921 rekomendasi yang ada, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti penyelesaiannya sebanyak 1.610 rekomendasi atau 83,81% dari total rekomendasi dengan rincian status penyelesaian yaitu status sesuai sebanyak 1.545 rekomendasi (80,43%) dan

status TPTD sebanyak 65 rekomendasi (3,38%). Sementara status rekomendasi belum sesuai sebanyak 231 rekomendasi (12,02%) dan status rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 80 rekomendasi (4,16%).

- 2) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023 – 2024  
Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut: 1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; 2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan 3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada periode tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi Stranas PK juga melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi monitoring/pelaporan ([jaga.id/monitoring](http://jaga.id/monitoring)). Kedua, terkait pelaksanaan aksi. Untuk sistem aplikasi [jaga.id/monitoring](http://jaga.id/monitoring), saat ini telah dikembangkan beberapa fitur baru agar lebih *user friendly* sehingga memudahkan K/L/D melakukan monitoring dan pelaporan aksi. Untuk evaluasi pelaksanaan aksi, sampai saat ini telah dilaksanakan terhadap 63 *milestones* pada periode B12 tahun 2023.

Dari 2 fokus yang dijabarkan ke dalam 7 aksi dan 63 *milestones*, berikut ringkasan capaiannya sampai Periode B12, terdiri dari:

**Fokus:**

- Fokus I Perizinan dan Tata Niaga
- Fokus II Keuangan Negara

7 Aksi pada periode B12 tahun 2023 mencapai total skor 34,83 dengan rincian:

- 1) Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan skor 79,04.
- 2) Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor yang diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat PVTTP, Direktorat PPH Tanaman Pangan, Direktorat PPH Hortikultura, dan Direktorat PPH Peternakan dengan skor 5,83.
- 3) Aksi Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pusdatin dengan skor 27,076.
- 4) Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan yang diampu oleh Badan Karantina Pertanian (yang sekarang telah menjadi Badan Karantina Indonesia) dengan skor 53,33.
- 5) Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024 yang diampu oleh Biro Perencanaan dengan skor 48,33.
- 6) Aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan Melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diampu oleh Biro Umum dan Pengadaan belum memperoleh skor.
- 7) Aksi Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk program pemerintah yang diampu oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, BPPSDMP, Pusdatin, Pusat Penyuluhan Pertanian, serta Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan skor 30,21.



Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku *focal point* Kementerian Pertanian, memperoleh apresiasi dari Tim Stranas PK KPK atas Keaktifan Berkoordinasi Dalam Rangka Monitoring Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.

### 3) Internal Audit Capability Model (IACM)



LAPORAN HASIL EVALUASI  
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
TAHUN 2023  
PADA INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Nomor : PE.2.33/LHE.23102102/12023  
Tanggal 30 Oktober 2023

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level *tingkat kapabilitas APIP*.

Hasil evaluasi atas PM Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat disimpulkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada **Level 3** dengan skor **3,090** dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil evaluasi atas PM Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,630
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,090</b>

Dengan rekomendasi:

- 1) Mendorong manajemen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko di tingkat kementerian
- 2) Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan setiap Topik dengan Elemen Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) secara terus menerus sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning* dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
- 3) Mendorong APIP untuk melakukan rencana aksi atas Aol dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP.
- 4) Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk membantu K/L/PD dalam memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD.

Tahun 2023, Kementerian Pertanian termasuk salah satu Kementerian yang ikut melaksanakan SPI yang diinisiasi oleh KPK. Survei dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah

kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam *agregat* secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN).

Sama seperti pada 2021 dan 2022 silam, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (*Whatsapp blast dan email blast*), maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator.

Hasil SPI 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, di mana Kementerian Pertanian mendapatkan skor sebesar 66,79. Perolehan skor internal sebesar 79,78, skor eksternal sebesar 88,84, dan skor eksper sebesar 57,84.

Berdasarkan hasil survei, KPK merumuskan rekomendasi agar Kementerian Pertanian dapat melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas antara lain perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, melakukan Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan korupsi, serta mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

5) Monitoring Penerbitan Laporan

Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Laporan merupakan bentuk komunikasi antara pelaksana tugas dengan pemberi tugas untuk mengetahui apakah kegiatan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan baik. Laporan hendaknya cepat, akurat, dan lengkap serta mudah dipahami oleh pembacanya. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2023 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS, dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23 Penerbitan Laporan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Laporan Terbit						Laporan Belum Terbit						Batal		Total ST
		Total		Tepat Waktu		Terlambat		Total		Masa KK		Terlambat				
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
1	SES	711	96,1	219	29,59	492	66,5	128	17,3	0	0	128	17,3	2	0,3	740
	a. Perencanaan	171	74	57	24,68	114	49,4	58	25,1	0	0	58	25,1	2	0,9	231
	b. KBMN	208	77,9	30	11,24	178	66,7	59	22,1	0	0	59	22,1	0	0	64
	c. Umum	96	93,2	19	18,45	77	74,8	7	6,8	0	0	7	6,8	0	0	205
	d. PHPEP	137	100	30	21,9	107	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	137
	e. Humas	99	96,1	83	80,58	16	15,5	4	3,88	0	0	4	3,88	0	0	103
2	IR 1	453	91,2	111	22,33	342	68,8	29	5,84	0	0	29	5,84	15	3	497
3	IR 2	424	83,3	112	22	312	61,3	45	8,84	0	0	45	8,84	40	7,9	509
4	IR 3	492	95,9	286	55,75	206	40,2	0	0	0	0	0	0	21	4,1	513
5	IR 4	478	92,8	137	26,6	341	66,2	27	5,24	0	0	27	5,24	10	1,9	515
6	IR INVES	193	55,1	69	19,71	124	35,4	139	39,7	0	0	139	39,7	18	5,1	350
	<b>Total</b>	<b>2.751</b>	<b>88,06</b>	<b>934</b>	<b>29,90</b>	<b>1.817</b>	<b>58,16</b>	<b>368</b>	<b>11,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>11,78</b>	<b>106</b>	<b>3,39</b>	<b>3.124</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah surat penugasan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 3.124 penugasan. Dari 3.124 penugasan telah terbit laporan sebanyak 2.751 laporan atau 88,06%, sedangkan laporan belum terbit sebanyak 368 laporan atau 11,78%.

Laporan terbit terdiri dari laporan terbit tepat waktu sebanyak 934 laporan atau 29,90% dan laporan terbit terlambat sebanyak 1.817 laporan atau 58,16%. Laporan belum terbit yaitu laporan belum terbit kategori terlambat sebanyak 368 laporan atau 11,78%. Laporan batal sebanyak 106 laporan atau 3,39%.

**5. Bagian Umum**

Bagian Umum terdiri dari Kelompok Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian dan Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga. Realisasi anggaran Bagian Umum sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.010.078.952,00

atau 98,08% dari pagu anggaran Rp8.167.260.000,00 realisasi *output* 24 dokumen atau 100,00% dari target *output* 24 dokumen, dengan rincian seperti tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24 Capaian Anggaran dan *Output* Bagian Umum

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBA. 960	051. Pengelolaan Kepegawaian	1.379.282.000	1.358.271.194	98,48	12	12	100,00
	Rumah Tangga dan Tata Usaha	6.787.978.000	6.651.807.758	97,99	12	12	100,00
<b>Total</b>		<b>8.167.260.000</b>	<b>8.010.078.952</b>	<b>98,08</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Bagian Umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, meliputi:

1) Pengembangan Kompetensi

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi untuk ASN dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Pengembangan kompetensi ASN selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Peraturan LAN tersebut, pengembangan kompetensi melalui pelatihan terdiri atas pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses

pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum. Pelatihan non klasikal merupakan proses praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas dan dilaksanakan melalui jalur pertukaran PNS dengan pegawai swasta; magang/praktik kerja; *benchmarking* atau *study visit*; pelatihan jarak jauh; *coaching*; *mentoring*; *detasering*; penugasan terkait program prioritas; *e-learning*; belajar mandiri/*self-development*; *team building*; dan jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan non klasikal.

PerLAN Nomor 5 Tahun 2018 juga mengatur tentang kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam periode 1 (satu) tahun. Perhitungan 1 (satu) jam pelajaran setara dengan 45 menit pembelajaran. Sehingga setiap instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan melalui rencana kerja anggaran tahunan instansi. Tentunya hal ini yang mendasari PPK untuk menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi serta melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN. Berikut adalah rekapitulasi pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh pegawai Inspektorat Jenderal selama tahun 2023 berikut.

Tabel 4.25 Pengembangan Kompetensi Klasikal

Jenis Pengembangan Kompetensi Klasikal	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	E-Learning : 9 - 24 Maret 2023 Tatap Muka : 2 - 5 Mei 2023	BPKP	4
Certified Risk Officer in Public Sector	Mei 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	26
Seminar Pengawasan : Pola Karier Auditor dalam membentuk Organisasi Pengawasan yang Ideal di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	13 Maret 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	4
Seminar Pengawasan : Pola Karier Auditor dalam membentuk Organisasi Pengawasan yang	12 Juli 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan	4

Jenis Pengembangan Kompetensi Klasikal	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
Ideal di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		Kuangan, Kementerian Keuangan	
Seminar Pengawasan : Pola Karier Auditor dalam membentuk Organisasi Pengawasan yang Ideal di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	18 Juli 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	4
Seminar Pengawasan : Pola Karier Auditor dalam membentuk Organisasi Pengawasan yang Ideal di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6 September 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	4
Workshop IKPA 2023 Seri I : "Implementasi IKPA Tahun 2023"	22 Februari 2023	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	1
Workshop IKPA 2023 Seri III 2023 : Kinerja dan Probis Proyeksi Target Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN 2023	7 Juli 2023	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	2
Workshop Kehumasan Tahun 2023 "Strategi Komunikasi Krisis"	27 Januari 2023	Biro Humas dan Informasi Publik Kementan	1
Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 210/PMK.05/2022 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	21 - 22 Februari 2023	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	1
Bimtek Pejabat Fungsional lingkup Kementerian Pertanian	20 - 21 Februari 2023	Biro Perencanaan Kementan	5
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2023	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	1
Bimbingan Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023	13 - 15 April 2023	Inspektorat II Itjentan	32
Workshop IKPA 2023 Seri III 2023 : Kinerja dan Probis Proyeksi Target Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN 2023	17 Juli 2023	Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan	2
Webinar IKA FPUA JABODETABEK dengan tema : Terpikat Cuan Alpukat, success story	21 Januari 2023	IKA FPUA DPD JABODETABEK	1
Webinar Penguatan Kerjasama Publisitas BPS untuk Data	2023	Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik	1

Jenis Pengembangan Kompetensi Klasikal	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
Berkualitas melalui Program Mahasiswa Cinta Statistik (MAHA CANTIK) pada Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023			
Kupas Tuntas Penulisan Buku Ilmiah Populer	31 Januari 2023	Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian	1
Webinar spillover analysis dengan tema : "Analisis Spillover Melalui Pendekatan Time Series dan Data Panel Menggunakan Rstudio"	18 Februari 2023	Quantitative Research Lab Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor	1
Statistics on Training "Webinar Pemodelan Spasial Data Area"	11 Maret 2023	Himpunan Profesi Mahasiswa Pascasarjana Statistika IPB	1
Sertifikat Lulus Diklat Auditor Ahli Utama	1-16 Agustus 2023	BPKP	4
Sertifikat Mengikuti Diklat Auditor Ahli Utama	1-16 Agustus 2023	BPKP	5
Certified Risk Officer in Public Sector	6 April 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	26
Sertifikat Mengikuti Diklat Auditor Ahli Muda	28 Maret - 15 Mei 2023	BPKP	14
Sertifikat Lulus Diklat Auditor Ahli Muda	28 Maret - 15 Mei 2023	BPKP	6
Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	E-Learning : 25 Mei - 9 Juni 2023 Tatap Muka : 12 - 15 Juni 2023	BPKP	3
Bimbingan Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023	13-15 April 2023	Inspektorat II Itjentan	32
Certified Risk Officer in Public Sector	10 - 12 April 2023	PT. RAP	26
Webinar Probiy Audit	21 Maret 2023	Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia (AAIPI)	1
Sertifikat Mengikuti Diklat Auditor Ahli Muda	5 Juni - 14 Juli 2023	BPKP	14
Seminar: Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	23 Mei 2023	Badan POM	1
Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	11-16 Juni 2023	BPKP	1
Sertifikat Lulus Diklat Auditor Ahli Muda	5 Juni - 14 Juli 2023	BPKP	6

Tabel 4.26 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal

Jenis Pengembangan Kompetensi Non Klasikal	Penyelenggara
E-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan II Tahun 2023	
Kemenkeu Corpu Open Class Rencana Kerja dan Anggaran : Langkah Awal Belanja Negara Berkualitas Tahun 2023	
Open Class (AP Corner) Highlight APBN Tahun 2023	
Open Class (AP Corner) Temuan BMN Berulang? Mitigasi dengan Implementasi PIPK! Tahun 2023	
Virtual Literasi Agriculture Live in Action "Sukses Bertani Kopi" Nomor Sertifikat : B-910/HM.130/A.10/06/2023	Sekretariat Jenderal Kementan
Open Class (AP Corner) Tips dan Trik Menghasilkan Laporan Keuangan 2022 yang Andal : Perspektif Kebijakan, Aplikasi, dan Pengendalian Internal Tahun 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri Periode 6 Mei s.d. 5 Juni 2023 Tahun 2023 Nomor Sertifikat : SKP-00207/2.3.1.2.042.R/03/03/2023/00207	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
Kemenkeu Corpu Open Class Rencana Kerja dan Anggaran : Langkah Awal Belanja Negara Berkualitas Tahun 2023 Penyelenggara : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Tanggal : 12 Juli 2023	
Kemenkeu Corpu Open Class Rencana Kerja dan Anggaran : Langkah Awal Belanja Negara Berkualitas Tahun 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
Open Class (AP Corner) Highlight APBN Tahun 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri Periode 6 Juli s.d. 5 Agustus 2023 Tahun 2023 Nomor Sertifikat : SKP-00498/2.3.1.2.042.R/03/03/2023/00498 Penyelenggara : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Tanggal : 1 September 2023	
E-Learning Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi pada Belanja Satuan Kerja Periode 6 Juli s.d. 5 Agustus 2023 Tahun 2023 Nomor Sertifikat : SKP-00026/2.3.1.2.183.R/03/03/2023/00026	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
E-Learning Proses Bisnis Penerapan PIPK Periode 6 Juli s.d. 5 Agustus 2023 Tahun 2023 Nomor Sertifikat : SKP-04502/2.3.1.2.213.R/03/03/2023/04502	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
E-Learning Pengantar PIPK Periode 6 Juli s.d. 5 Agustus 2023 Tahun 2023 Nomor Sertifikat : SKP-04944/2.3.1.1.092.R/03/03/2023/04944	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

Jenis Pengembangan Kompetensi Non Klasikal	Penyelenggara
Online Training : Digital Forensics	Pusilkom UI
Knowledge sharing Library Café BPKP dengan tema "Kupas Tuntas Telaah Sejawat untuk Praktik Profesional APIP" Nomor Sertifikat : HM.05/SERT-190/LB/2023	BPKP
Knowledge sharing Library Café BPKP dengan tema "Kupas Tuntas Telaah Sejawat untuk Praktik Profesional APIP" Nomor Sertifikat : HM.05/SERT-190/LB/2023	BPKP
Knowledge sharing Library Café BPKP dengan tema "Kupas Tuntas Telaah Sejawat untuk Praktik Profesional APIP" Nomor Sertifikat : HM.05/SERT-190/LB/2023 Penyelenggara : BPKP Tanggal : 21 Maret 2023	
Tani on Stage (TOS) dengan tema : Pentingnya "PASPOR" bagi Hewan Qurban Anda	Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian

#### D. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan sistem informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian tersaji pada tabel 4.27 berikut:

Tabel 4.27 Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33.91	34.53	101.83
		1.2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3.00	3.00	100.00
		1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Level	3.00	2.00	66.67
		1.4	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	85.00	100.00	117.65
		1.5	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	%	90.00	94,10	104.56
		1.6	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	85.00	89.05	104.76
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	90.00	90.72	100.80

Kriteria penilaian capaian kinerja setiap sasaran strategis dan masing-masing indikator menggunakan kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, penetapan kategori capaian kinerja melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Predikat/Kategori Sangat Berhasil (nilai *scoring* > 100%)
- b. Predikat/Kategori Berhasil (nilai *scoring* 80 – 100%)
- c. Predikat/Kategori Cukup (nilai *scoring* 60 – 79%)
- d. Predikat/Kategori Kurang Berhasil (nilai *scoring* <60%).

## BAB VI

### PENUTUP

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang selalu berkembang, baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan anggaran yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal terus menerus meningkatkan kinerja, mulai dari pengembangan kompetensi SDM pengawasan, serta sistem dan kebijakan pengawasan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selama tahun 2023, pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan optimal, ditandai dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp127.765.411.183,00 atau 97,51% dari pagu sebesar Rp131.030.528.000,00. Realisasi fisik/*output* sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 654 laporan atau 106% dari target fisik/*output* sebanyak 617 laporan.

Terhadap capaian kinerja yang belum memperoleh hasil yang optimal, Inspektorat Jenderal akan terus melakukan perbaikan agar dapat mencapai hasil yang optimal pada tahun depan

# Lampiran

## Pagu Anggaran Awal Per Jenis Belanja Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
51	Belanja Pegawai	23.213.360.000
52	Belanja Barang	124.155.749.000
53	Belanja Modal	6.852.705.000
<b>Total</b>		<b>154.221.814.000</b>

## Pagu Anggaran Awal Per Kegiatan Tahun 2023

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
018.02.WA.Program Dukungan Manajemen		<b>154.221.814.000</b>	<b>617</b>	
1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjen		<b>56.451.264.000</b>	<b>110</b>	
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	4.158.196.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	6.592.526.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	3.053.166.000	12	Layanan
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	28.533.749.000	24	Layanan
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	6.852.705.000	2	Unit
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6.057.462.000	12	Dokumen
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1.203.460.000	12	Dokumen
4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan		<b>97.770.550.000</b>	<b>507</b>	
<b>INSPEKTORAT I</b>	<b>Laporan</b>	<b>20.549.386.000</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.792.084.000	51	Laporan
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.813.320.000	24	Laporan
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	162.576.000	4	Laporan
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000	27	Laporan
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	13.842.523.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT II</b>	<b>Laporan</b>	<b>20.350.000.000</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.860.580.000	50	Laporan
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.100.322.000	18	Laporan
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000	2	Laporan
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000	16	Laporan
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	14.861.110.000	12	Laporan

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>20.111.872.000</b>	<b>105</b>	
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.598.896.000	51	Laporan
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.455.096.000	24	Laporan
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000	2	Laporan
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000	24	Laporan
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	14.129.878.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>20.100.691.000</b>	<b>114</b>	
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.581.196.000	51	Laporan
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000	24	Laporan
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000	3	Laporan
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000	24	Laporan
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	14.552.515.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.658.601.000</b>	<b>72</b>	<b>Laporan</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4.427.700.000	60	Laporan
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	12.230.901.000	12	Laporan

### Pagu Anggaran Revisi I Per Jenis Belanja Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
51	Belanja Pegawai	22.122.074.000
52	Belanja Barang	124.155.749.000
53	Belanja Modal	6.852.705.000
<b>Total</b>		<b>153.130.528.000</b>

### Pagu Anggaran Revisi I Per Kegiatan Tahun 2023

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
<b>018.02.WA.Program Dukungan Manajemen</b>		<b>153.130.528.000</b>	<b>617</b>	
1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjentan		<b>55.359.978.000</b>	<b>110</b>	
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	4.158.196.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	6.592.526.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	3.053.166.000	12	Layanan
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	27.442.463.000	24	Layanan
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	6.852.705.000	2	Unit
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6.057.462.000	12	Dokumen
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1.203.460.000	12	Dokumen

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan		97.770.550.000	507	
<b>INSPEKTORAT I</b>	<b>Laporan</b>	<b>20.549.386.000</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.792.084.000	51	Laporan
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.813.320.000	24	Laporan
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	162.576.000	4	Laporan
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000	27	Laporan
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	13.842.523.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT II</b>	<b>Laporan</b>	<b>20.350.000.000</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.860.580.000	50	Laporan
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.100.322.000	18	Laporan
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000	2	Laporan
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000	16	Laporan
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	14.861.110.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>20.111.872.000</b>	<b>105</b>	
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.598.896.000	51	Laporan
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.455.096.000	24	Laporan
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000	2	Laporan
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000	24	Laporan
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	14.129.878.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>20.100.691.000</b>	<b>114</b>	
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.581.196.000	51	Laporan
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000	24	Laporan
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000	3	Laporan
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000	24	Laporan
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	14.552.515.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	<b>Laporan</b>	<b>16.658.601.000</b>	<b>72</b>	<b>Laporan</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4.427.700.000	60	Laporan
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	12.230.901.000	12	Laporan

**Pagu Anggaran Revisi II Per Jenis Belanja Tahun 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
51	Belanja Pegawai	22.122.074.000
52	Belanja Barang	108.055.749.000
53	Belanja Modal	4.852.705.000
<b>Total</b>		<b>135.030.528.000</b>

**Pagu Anggaran Revisi II Per Kegiatan Tahun 2023**

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
<b>018.02.WA.Program Dukungan Manajemen</b>		<b>135.030.528.000</b>	<b>617</b>	
<b>1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjen</b>		<b>52.859.978.000</b>	<b>110</b>	
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	4.158.196.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	6.592.526.000	24	Layanan
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	2.553.166.000	12	Layanan
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	27.442.463.000	24	Layanan
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	4.852.705.000	2	Unit
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6.057.462.000	12	Dokumen
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1.203.460.000	12	Dokumen
<b>4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan</b>		<b>82.170.550.000</b>	<b>507</b>	
<b>INSPEKTORAT I</b>	<b>Laporan</b>	<b>17.299.386.000</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.792.084.000	51	Laporan
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.813.320.000	24	Laporan
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	162.576.000	4	Laporan
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000	27	Laporan
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	10.592.523.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT II</b>	<b>Laporan</b>	<b>17.100.000.000</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.860.580.000	50	Laporan
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.100.322.000	18	Laporan
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000	2	Laporan
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000	16	Laporan
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	11.611.110.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>16.861.872.000</b>	<b>105</b>	
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.598.896.000	51	Laporan

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output	Satuan
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.455.096.000	24	Laporan
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000	2	Laporan
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000	24	Laporan
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	10.879.878.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>16.850.691.000</b>	<b>114</b>	
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.581.196.000	51	Laporan
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000	24	Laporan
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000	3	Laporan
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000	24	Laporan
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	11.302.515.000	12	Laporan
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	<b>Laporan</b>	<b>14.058.601.000</b>	<b>72</b>	<b>Laporan</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4.427.700.000	60	Laporan
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	9.630.901.000	12	Laporan

**Rincian Data Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023**

<b>Pejabat Struktural</b>	<b>10 orang</b>
2 Eselon II	4 orang
3 Eselon III	1 orang
4 Eselon IV	5 orang
<b>Pejabat Fungsional Auditor</b>	<b>169 orang</b>
1 Auditor Ahli Utama	10 orang
2 Auditor Ahli Madya	56 orang
3 Auditor Ahli Muda	41 orang
4 Auditor Ahli Pertama	62 orang
<b>Pejabat Fungsional Tertentu</b>	<b>37 orang</b>
1 Analis Kepegawaian Ahli Muda	4 orang
4 Perencana Ahli Madya	3 orang
5 Perencana Ahli Muda	3 orang
6 Perencana Ahli Pertama	2 orang
7 Arsiparis Ahli Muda	2 orang
8 Arsiparis Ahli Pertama	1 orang
9 Arsiparis Mahir	2 orang
11 Pranata Humas Ahli Muda	1 orang
12 Pranata Ahli Komputer	3 orang
13 Analis Hukum Ahli Muda	1 orang
14 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1 orang
15 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2 orang
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1 orang
16 Statistisi Ahli Madya	1 orang
17 Statistisi Ahli Muda	2 orang
18 Analis Kebijakan Ahli Madya	1 orang
19 Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1 orang
20 Calon Analis SDM Aparatur Terampil	1 orang
21 Pustakawan Terampil	1 orang
22 Pranata Keuangan APBN Terampil	1 orang
23 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1 orang
24 Calon Analis Anggaran Ahli Pertama	1 orang
<b>Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)</b>	<b>55 orang</b>
<b>PPPK</b>	<b>2 orang</b>
<b>Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	
1 S3	1 orang
2 S2	122 orang
3 S1	119 orang
4 D4	0 orang
5 D3	8 orang
6 SLTA	21 orang
7 SLTP	0 orang
8 SD	0 orang
<b>Pegawai Berdasarkan Golongan</b>	
1 Golongan IV	86 orang

2	Golongan III	175 orang
3	Golongan II	8 orang
4	Golongan I	0 orang
5	IX dan VII	2 orang

**Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

1	Pria	143 orang
2	Wanita	128 orang

**Pegawai Berdasarkan Agama**

1	Islam	243 orang
2	Protestan	19 orang
3	Katholik	8 orang
4	Hindu	1 orang



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id